



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen Renja ini merupakan turunan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan tetap mempedomani dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2026. Dalam menyusun dokumen ini tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sebagai tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 yang telah diubah menjadi Perubahan RPJMD (Perda Nomor 6 Tahun 2021), kedudukan Renja Tahun 2023 ini sangat strategis dan menjadi tolak ukur keberhasilan atas pencapaian Visi dan Misi Sumatera Utara. Untuk percepatan pencapaian Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan 54 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang harus dituntaskan dalam Tahun 2024 dimana Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah mengemban dua kegiatan yaitu Reformasi Birokrasi dan Pemberian Bantuan Rumah Ibadah yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Biro Kesejahteraan Rakyat.

Dokumen Renja ini merupakan sebuah dokumen semi kompilasi yang merupakan kumpulan program dan kegiatan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dijadikan satu dokumen. Kebijakan pembuatan satu Dokumen Renja untuk Sekretariat Daerah merupakan lanjutan kebijakan satu dokumen Rencana Strategi (Renstra) yang telah terlebih dahulu diterbitkan. Dengan demikian diharapkan melaksanakan program dan kegiatan antar Biro di lingkungan Sekretariat Daerah tidak tumpang tindih dan bisa saling bersinergi dalam mendukung pencapaian Visi Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan

Bermartabat. Selain itu, penyatuan dokumen ini sebagai upaya untuk mendorong Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang utuh sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dipedomani dan menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Medan,

2023

SEKRETARIS DAERAH



ARIEF S. TRINUGROHO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1. Maksud	3
2. Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	6
A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6
1. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2023 dan Capaian Renstra	6
2. Analisa Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu	7
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	10
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
B. Biro Kesejahteraan Rakyat	20
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	20
2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu	29
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31

C. Biro Hukum	32
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023	32
2. Analisa Kinerja Pelayanan Biro Hukum Setdaprovsu	37
3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	39
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	42
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
D. Biro Perekonomian	44
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	44
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	68
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	74
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	75
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	82
E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	82
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023	82
2. Analisa Kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu	84
3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	86
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	86
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	87
F. Biro Administrasi Pembangunan	87
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Pd Tahun 2023 Dan Capaian Renstra PD	87
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	93
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	94
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	94
5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	100
G. Biro Organisasi	100
1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu	100

2.	Analisis Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setdaprovsu	102
3.	Isu isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	107
4.	Review terhadap rancangan awal RKPD	108
5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	112
H.	Biro Umum	112
1.	Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu	112
2.	Analisis Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Umum Setdaprovsu	124
3.	Review terhadap rancangan awal RKPD	125
4.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	133
I.	Biro Administrasi Pimpinan	133
1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	133
2.	Analisis Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu	141
3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	142
4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	143
5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	148
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		149
A.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	149
1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional	149
2.	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	149
3.	Program Dan Kegiatan Prioritas	150
B.	Biro Kesejahteraan Rakyat	159
1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Nasional	159
2.	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	159
3.	Program dan Kegiatan	161
C.	Biro Hukum	161

1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional	161
2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	163
3.	Program dan Kegiatan	163
D.	Biro Perekonomian	164
1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	164
2.	Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian SetdaprovSU	165
3.	Program dan Kegiatan	166
E.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	167
1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional	167
2.	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	168
3.	Program dan Kegiatan	169
F.	Biro Administrasi Pembangunan	170
1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	170
2.	Tujuan Dan Sasaran	171
3.	Program Dan Kegiatan	171
G.	Biro Organisasi	177
1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional	177
2.	Tujuan dan sasaran Biro Organisasi SetdaprovSU	178
3.	Program dan Kegiatan Biro Organisasi SetdaprovSU	178
H.	Biro Umum	178
1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional	178
2.	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	179
3.	Program dan Kegiatan	180
I.	Biro Administrasi Pimpinan	188
1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Nasional	188
2.	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	188
3.	Program dan Kegiatan	189

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 195

A.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	195
B.	Biro Kesejahteraan Rakyat	199
C.	Biro Hukum	200
D.	Biro Perekonomian	201

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	205
F. Biro Administrasi Pembangunan	206
G. Biro Organisasi	207
H. Biro Umum	209
I. Biro Administrasi Pimpinan	210
BAB V PENUTUP	212

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah SetdaprovSU Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara.....	9
Tabel 2.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 Provinsi Sumatera Utara Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU	12
Tabel 3.	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Provinsi Sumatera Utara	19
Tabel 4.	Formulasi Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU Periode pelaksanaan 2023	23
Tabel 5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU	30
Tabel 6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 Biro Hukum SetdaprovSU (Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	39
Tabel 7.	Usulan Program dan Kegiatan Biro Hukum SetdaprovSU Dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara	44
Tabel 8.	Perkembangan Inflasi pada Tahun 2021 Biro Perekonomian SetdaprovSU	48
Tabel 9.	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Realisasi Anggaran Biro Perekonomian SetdaprovSU	66
Tabel 10.	Komposisi Sumber Daya Manusia Biro Perekonomian berdasarkan pendidikan/fungsional jabatannya	70
Tabel 11.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian SetdaprovSU	70
Tabel 12.	Perubahan Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian SetdaprovSU	71
Tabel 13.	Program, Kegiatan, Indikator Output, Rencana Awal dan Hasil Analisa Biro Perekonomian	71
Tabel 14.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian SetdaprovSU	72
Tabel 15.	Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Tahun 2024-2026	72
Tabel 16.	Rewiew terhadap Rancangan awal RKPD Biro Perekonomian.....	76
Tabel 17.	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2021 Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	85

Tabel 18.	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu	87
Tabel 19.	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan Pencapaian renstra perangkat daerah sd Tahun 2022	90
Tabel 20.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	93
Tabel 21.	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara.....	96
Tabel 22.	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Provinsi Sumatera Utara.....	100
Tabel 23.	Pencapaian Kinerja Renstra Biro Organisasi Tahun 2021 berdasarkan sasaran dan indikator kinerja utama.....	102
Tabel 24.	Daftar Restrukturisasi Biro Organisasi Setdaprovsu	103
Tabel 25.	Sasaran dan Capaian terhadap indikator kinerja Utama Biro Organisasi Setdaprovsu	107
Tabel 26.	Realisasi anggaran dan capaian kinerja Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun anggaran 2023	110
Tabel 27.	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Provinsi Sumatera Utara.....	113
Tabel 28.	Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang tercantum pada RKPD Biro Umum Tahun Anggaran 2022.....	115
Tabel 29.	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sd tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara.....	120
Tabel 30.	Pencapaian Kinerja pelayanan Biro Umum Setdaprovsu	126
Tabel 31.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara.....	128
Tabel 32.	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Provinsi Sumatera Utara.....	134
Tabel 33.	Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sd tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara.....	137

Tabel 34.	Pencapaian kinerja pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu ...	143
Tabel 35.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu	145
Tabel 36.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu	149
Tabel 37.	Rumusan rencana dan kegiatan SKPD Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu	153
Tabel 38.	Tujuan dan sasaran Renja Biro Perekonomian Setdaprovsu	166
Tabel 39.	Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu	167
Tabel 40.	Rumusan rencana dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025	175
Tabel 41.	Rumusan rencana program dan kegiatan Biro Umum Setdaprovsu Tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025	183
Tabel 42.	Rumusan rencan Program dan kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu Tahun 2023 dan Prakiraan maju tahun 2024.....	192
Tabel 43.	Daftar Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun anggaran 2024	197
Tabel 44.	Program dan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu.....	200
Tabel 45.	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun Anggaran 2023	203
Tabel 46.	Program,Kegiatan dan Sub kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu	206
Tabel 47.	Program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	207
Tabel 48.	Program, Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu	209
Tabel 49.	Program/Kegiatan dan Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu	212

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) berusaha untuk melakukan percepatan dalam penataan organisasi, penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia yang disusun kedalam sebuah Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 yang diselaraskan dengan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara, yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2026.

Sesuai ketentuan dengan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, dan Perubahan RKPD (PRKPD) serta menjadi landasan dalam penyusunan KUPA dan perubahan PPAS untuk penyusunan perubahan APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk lebih optimal. Berdasarkan peranan tersebut maka penting bagi SetdaprovSU merumuskan rancangan Rencana Kerja (Renja). Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja untuk periode satu tahun sebagai implementasi dan dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- b. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Memberikan pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah;
- d. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2023-2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- f. Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU selama tahun 2022 dan perkiraan target pada tahun 2024.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2024 ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 100% Anggaran Kegiatan ini dialihkan untuk Kegiatan lain pada P. APBD 2024.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada lampiran.

2. Analisa Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU.

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2022) yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, data wilayah, toponimi dan rupa bumi, standar pelayanan minimal, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi pertanahan, fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan DPRD, penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serta administrasi perjalanan dinas luar negeri, penataan urusan kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan Penyelesaian batas daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitasi Kerjasama.

Dalam urusan Penyelesaian batas daerah yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU. Kegiatan yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU berupa melaksanakan perundingan, penetapan dan peneguhan tapal batas wilayah Kabupaten/Kota, memfasilitasi tim persiapan pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan batas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Untuk urusan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU adalah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan, monitoring, pemantauan dan evaluasi data informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyajikan dan melaporkan data dan informasi hasil monitoring, pemantauan dan evaluasi data informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan penyusunan

petunjuk pelaksanaan/ teknis pembinaan penyusunan LKPJ, LPPD dan ringkasan LPPD, menyusun statistik data informasi mengenai LKPJ, LPPD dan ringkasan LPPD.

Sedangkan untuk urusan Fasilitasi Kerjama, kegiatan yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta dalam dan luar negeri, pelaksanaan pengkajian penawaran kerja sama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha/Swasta dalam dan luar negeri, pelaksanaan pembahasan bersama draf kerja sama dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dan/atau sinergi pelaksanaan perencanaan pembangunan, fasilitasi penandatanganan naskah kerja sama, pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan APBD atau tidak menggunakan APBD (izin alasan penting).

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

Berikut adalah tabel mengenai pencapaian kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu :

TABEL 1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH SETDAPROVSU TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Reliasasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023 (TW-II)	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penyelesaian Batas Daerah			80%	100%			100%	50%	-	-	
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan			3-4	3-4			-	-	-	-	
3	Persentase kerjasama yang terealisasi			100%	100%			100%	50%	-	-	

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, telaahan terhadap visi dan misi Provinsi Sumatera Utara, telaahan terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, maka diperoleh isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Provinsi Sumatera Utara diantaranya dilaksanakan melalui pembinaan mental keagamaan. Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral.
- b. Masih cukup banyak terjadi sengketa kepemilikan lahan dan sengketa peruntukan penggunaan lahan. Sengketa kepemilikan tanah sering kali disebabkan karena kurang pemahamannya masyarakat tentang peraturan kepemilikan tanah. Terjadinya sengketa secara tidak langsung akan menghambat perekonomian masyarakat. Banyaknya kasus pertanahan bisa menghambat jalannya pembangunan. Pembangunan jalan baru sering kali terkendala dalam pembebasan lahan. Hal tersebut menghambat penambahan akses jalan untuk mendukung laju perekonomian.
- c. Sebagian besar daerah cenderung tidak terlalu memperhatikan Kerjasama Antar Daerah melalui Tim TKKSD terkait, hal tersebut dikarenakan daerah kurang menyadari potensi yang bisa dikerjasamakan. Pemerintah Provinsi bisa berperan dalam hal mengkaji potensi-potensi kerjasama tersebut.
- d. Permasalahan Penataan Batas Wilayah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU telah meriviu rancangan awal RKPD, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang dapat membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Rencana kerja 2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU telah mengusulkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU dengan usulan sebesar Rp.

8.282.400.000,- (Delapan milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang nantinya dapat direalisasikan kepada setiap program dan kegiatan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2023 PROVINSI SUMATERA UTARA

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDAPROVSU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Utara	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,842,400,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Utara	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,842,400,000	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara			8,200,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara			8,200,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	8,200,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	8,200,000	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat	Sumatera Utara			7,200,000	Administrasi Keuangan Perangkat	Sumatera Utara			7,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Daerah					Daerah					
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	7,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	7,200,000	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	25,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	25,000,000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	25,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	25,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	915,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	915,000,000	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35,000,000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	320,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	320,000,000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%	767,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%	767,000,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7,000,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	760,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	760,000,000	
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	120,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	120,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	120,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	120,000,000	
B.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Sumatera Utara	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	6,440,000,000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Sumatera Utara	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	6,440,000,000	
I.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sumatera Utara	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	1,850,000,000	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sumatera Utara	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	1,850,000,000	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	850,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	850,000,000	
2	Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1,000,000,000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1,000,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
II.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	2,950,000,000	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	2,950,000,000	
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	1,500,000,000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	1,500,000,000	
2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	550,000,000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	550,000,000	
3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	900,000,000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	900,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
III	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sumatera Utara	Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	100%	1,640,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sumatera Utara	Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	100%	1,640,000,000	
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	600,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	600,000,000	
2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	480,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	480,000,000	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	560,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	560,000,000	

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu pada Tahun 2024 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu.

Tabel 3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual belum mencapai 100% hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa calon penerima hibah yang belum memenuhi syarat administrasinya berupa kelengkapan berkas untuk menerima Bantuan hibah.
 2. Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar belum mencapai angka 100% karena masih terdapatnya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan akibat kurangnya personel untuk melakukan pengerjaan kegiatan ini dalam hal berkunjung ke daerah-daerah di Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan. Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:
 1. Data dan informasi mengenai pelaksanaan hibah di Wilayah provinsi Sumatera Utara telah optimal namun belum sempurna karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan dokumen maupun cara melengkapi dokumen tersebut.
 2. Tidak adanya standarisasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan kegiatan pemberian hibah bagi masing-masing penerima hibah maka hasilnya tidak dapat diprediksi dan tidak sesuai yang diinginkan.

3. Masih kurangnya pemahaman tentang hibah dan laporan pertanggungjawaban hibah dari calon penerima hibah di Wilayah Sumatera Utara.
 4. Padatnya volume kegiatan kerja yang membuat beberapa pekerjaan harus dilakukan pada waktu yang sama sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak dapat mencapai hasil yang optimal.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dari kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, antara lain:

1. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah di Sumatera Utara;
 2. Terlaksananya perayaan hari besar Kenegaraan dan Keagamaan di wilayah Sumatera Utara;
 3. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Swasta, Pesantren, dan TPA di Wilayah Sumatera Utara;
 4. Terlaksananya penyelenggaraan Keberangkatan dan Pemulangan Jamaah Ibadah Haji di Wilayah Sumatera Utara.
4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pemberian bantuan hibah di Wilayah masyarakat;
2. Minimnya database yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan bantuan hibah di Wilayah Sumatera Utara;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

4. Belum adanya pemisahan tugas yang jelas dengan OPD rekanan terkait tugas dan fungsi masing-masing OPD, yang sering memperlambat kegiatan pekerjaan.

Untuk mengatasi isu dan permasalahan di atas, Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU perlu berbenah dan menata secara kelembagaan serta membangun sinergisitas dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lembaga/instansi Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta dan masyarakat mengingat Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan maupun pelayanan Perangkat daerah lainnya.

Selanjutnya bahwa wibawa Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tercermin dari meningkatnya pembangunan dan standard hidup masyarakatnya. Peningkatan pembangunan dan standard hidup masyarakat tampak dari terfasilitasinya sarana dan prasarana rumah ibadah dan sekolah di Wilayah Sumatera Utara.

Tabel. 4
 Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sumatera Utara
 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
 Periode Pelaksanaan 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
								I		II									
3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		16	17
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
Urusan : WAJIB																			
Bidang Urusan : OTDA, PEMUM, ADM KEUDA, PERNGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN																			

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Volume Kegiatan Perkantoran dalam rangka menunjang kinerja	100%	2.724.667.540	100%	1.714.352.040		3.326.762.764	25%	231.417.635		704.445.637	935.863.272	25%	348.261.515	25%	20,31%		2.062.613.555	Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
<i>Admisnistrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah transaksi gaji	100 unit	1.714.352.040	51	1.714.352.040	2000	1.123.001.768	500	118.401.635	500	124.345.319	242.746.954	1000	242.746.954	1961%	14,16%		1.957.098.994	Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran Biro Binkemos	100 Unit	1.371.945.500	1000	640.800.000	1000	2.203.760.996	500	113.016.000	500	580.100.318	693.116.318	1000	693.116.318	100%	108,16%		1.333.916.318	Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
Rata-Rata capaian kinerja (%)															206%	12%			
Predikat Kerja															Baik	Buruk			
Program Kesejahteraan Rakyat																			
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pencairan Hibah	324.837.448.423	100%	181.003.528.670	1374	181.003.528.670	25%	302.034.351			302.034.351	25%	302.034.351	25%	0,17%		181.305.563.021	Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
<i>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual</i>	Jumlah Proposal	jumlah proposal	319.059.193.423	1523	319.059.193.423	1350	124.067.154.000	1	Rp165.046.871	821	436.948.460	601.995.331	822	Rp601.995.331	54%	0,19%		319.661.188.754	Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu

- <i>Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual</i>	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual	jumlah proposal hibah	57.782.550.000	22	23.150.000.000	24	56.936.374.670	1	136.987.480	16	576.122.912	713.110.392	17	713.110.392	77%	3,08%		23.863.110.392	Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU
Rata-Rata capaian kinerja (%) 13%																0%			
Predikat Kerja Baik																Buruk			
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		95.608.778.662	100%	95.608.778.662	835	121.134.590.436	25%	138.365.000	561.799.450	700.164.450	25%	700.164.450	25%	0,73%	25%		96.308.943.112	Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU
- <i>Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		94.060.265.500	940	94.060.265.500	826	120.110.227.400	1	138.365.000	725	334.647.700	473.012.700	726	473.012.700	77%	0,50%		94.533.278.200	Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU
- <i>Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</i>	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		1.548.513.162	12	1.548.513.162	8	941.201.766	3 bln	-	3 bln	227.151.750	227.151.750	6	227.151.750	50%	14,67%		1.775.664.912	Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU
- <i>Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja</i>	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian		1.548.513.162	12	1.548.513.162	1	83.161.270	3 bln	-	-	-	-	3	-	25%	0,00%		1.548.513.162	Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU

<i>Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</i>	Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																			
Rata-Rata capaian kinerja (%)														15%	2%					
Predikat Kerja														Baik	Buruk					
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Non Rakyat Pelayanan Dasar		447.650.166	100%	5.966.409.750	5.966.409.750	0%	54.554.500		131.633.050	186.187.550			0%	0,00%	25%	5.966.409.750	Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu		
											-									
<i>- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</i>	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		332.765.166	100%	332.765.166	1	5.420.320.00	3 bln	20082000	3 bln	48.911.000	68.993.000		0%	0,00%		332.765.166	Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu		

- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		114.885.000	100%	114.885.000	1	546.089.750	3 bln	34.472.500	3 bln	82.722.050	117.194.550			0%	0,00%		114.885.000	Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu		
															Rata-Rata capaian kinerja (%)		0%	0%			
															Predikat Kerja		Baik	Buruk			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							284.293.069.122		726.371.486		1.397.878.137		2.124.249.623								
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D PROGRAM X)		8%	2%			
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D PROGRAM X)		Baik	Buruk			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																			
Memotivasi kerja yang tinggi dan berkualitas																			
faktor penghambat pencapaian kinerja :																			
Banyaknya Proposal Hibah yang dicairkan tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di Biro Kesra																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan Program / Kegiatan dengan anggaran sesuai triwulan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Melaksanakan Program / Kegiatan sesuai dengan resntra dengan renja SKPD																			

2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta fasilitasi mental spiritual, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pengumpulan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Urusan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua pelayanan fasilitasi pembangunan rumah ibadah, sekolah, perayaan hari besar, hingga penyelenggaraan Ibadah Haji terselenggara dengan baik dengan angka penetapan yaitu 100%. Namun untuk realisasi anggarannya mencapai sekitar 97,75%, yang mengindikasikan bahwa capainya dari kegiatan

yang dilakukan telah mencapai kesesuaian terhadap kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovs yang dituangkan dalam Renstra.

Tabel. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022 (TW-II)	2023	2024	
1	2	3	4	6	7	8	10		11	12	13
1	Pelaksanaan Hibah yang ditindaklanjuti			100 %	100%	100%	90.36%	97,75 %			
2	Kebijakan kesra yang ditindaklanjuti			100 %	100%	100%	90.36%	97,75 %			

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, perlu disusun dan ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menyusun program kerja serta tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu merupakan unsur unsur operasional (Dinas Teknis) dan unsur penunjang (Lembaga Teknis Daerah).

Sebagai penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah dan masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (Good Governance).

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, antara lain:

- a. Overlapping eksternal disebabkan oleh tidak spesifiknya tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, Badan dan Biro. Dalam konteks ini area kewenangan dalam

hal koordinasi dan perumusan kebijakan urusan perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah serta materi dan komunikasi Pimpinan.

- b. Alokasi anggaran yang dimiliki Biro Kesejahteraan Rakyat saat ini perlu digunakan dan diberdayakan dengan optimal dan segera. Mengingat banyaknya kegiatan dan jumlah proposal hibah yang perlu direalisasikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- c. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu perlu melakukan penataan dan penguatan organisasi, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Penataan dan penguatan ini diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan OPD, lembaga/instansi Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta dan masyarakat.

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada penetapan RKPD Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu memperoleh alokasi Anggaran sebesar Rp.301.590.895.120,- (tiga ratus satu milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh lima serratus dua puluh rupiah) dengan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang di setujui, selanjutnya pada awal penetapan APBD Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu memperoleh alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 423.980.174.791,- (Empat ratus dua puluh tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh serratus tujuh puluh empat tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran visi dan misi serta strategi dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Mengingat munculnya isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan. program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 terhadap perubahan yang mengakibatkan adanya penambahan kegiatan, indikator, target dan pendanaanya tersebut ini adalah merupakan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan oleh Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu pada tahun 2024.

C. Biro Hukum

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Hukum Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Hukum Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2026. Adapun penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi Anggaran 2022 yang diterima Biro Hukum Setdaprovsu menurut DPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.074.148.000,- yang terdiri dari 2 Program dan 7 Kegiatan. Sedangkan Alokasi anggaran yang diterima oleh Biro Hukum Setdaprovsu menurut DPPA Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.264.997.100,- Dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 2 Program dan 7 Kegiatan.

- A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2022, keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan target (pagu) senilai Rp. 2.314.886.300, telah terealisasi sebesar Rp. 2.247.027.388, dengan persentase capaian sebesar 97,07%, rincian kegiatannya:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target (pagu) senilai Rp. 152.040.000, telah terealisasi sebesar Rp. 152.040.000, dengan persentase capaian sebesar 100,00%.
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan target (pagu) senilai Rp. 394.984.000, telah terealisasi sebesar Rp. 367.103.800, dengan persentase capaian sebesar 92,94%.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target (pagu) senilai Rp. 1.352.871.700, telah terealisasi sebesar Rp. 1.343.542.150, dengan persentase capaian sebesar 99,31%.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan target (pagu) senilai Rp. 401.990.600, telah terealisasi sebesar Rp. 371.841.438, dengan persentase capaian sebesar 92,50%
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target (pagu) senilai Rp. 13.000.000, telah terealisasi sebesar Rp. 12.500.000, dengan persentase capaian sebesar 96,15%
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan target (pagu) senilai Rp. 2.759.261.700, telah terealisasi sebesar Rp. 2.598.711.948, dengan persentase capaian sebesar 94,18%, rincian kegiatannya:
 - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, dengan target (pagu) senilai Rp. 1.093.787.700, telah terealisasi sebesar Rp. 1.059.246.318, dengan persentase capaian sebesar 96,84%

- b. Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan target (pagu) senilai Rp. 1.665.474.000, telah terealisasi sebesar Rp. 1.539.465.630, dengan persentase capaian sebesar 92,43%.

Terkait dengan pencapaian target RENSTRA perangkat daerah sampai dengan tahun tahun 2022 ada 2 (dua) program yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan rincian:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

- 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
- 4) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

B. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Hukum SetdaprovSU dengan perangkat daerah lain.
4. Belum terlaksananya dengan baik penyusunan produk hukum daerah khususnya di Kabupaten/Kota.
5. Belum optimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
7. Masih kurangnya Aparatur dalam melaksanakan penanganan perkara Di Lingkungan PemprovSU.
8. Kurang memadainya sarana dan prasarana kantor sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
10. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik Kabupaten/kota.

C. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi

yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu, antara lain:

1. Bahwa draft ranperda yang masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provsu belum semuanya dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini tentunya berdampak kepada Pembangunan di Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 2. Masih minimnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Evaluasi terhadap ranperda Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya berdampak kepada Tugas dan Fungsi Gubernur sebagai Pembina dan Pengawas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan berdampak terhadap pelaporan ke Pemerintah Pusat.
 3. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Biro Hukum Setdaprovsu berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
 4. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
 5. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Biro Hukum Setdaprovsu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Perangkat Daerah.
- D. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan;
3. Kerjasama dengan pihak Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang

selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

2. Analisa Kinerja Pelayanan Biro Hukum SetdaprovSU

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai yaitu Program Perencanaan Hukum dengan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara dan terciptanya kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan kemudian untuk mencegah terjadinya praktek mafia hukum/mafia peradilan, pemberantasan korupsi dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).

Khusus mengenai upaya penegakan HAM yang juga termasuk salah satu program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum, guna mendukung terwujudnya penegakan HAM di daerah-daerah, dilaksanakan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional penegakan HAM (RANHAM) yang pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen masyarakat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai visi dan misi, Biro Hukum SetdaprovSU melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum SetdaprovSU adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Kewenangan Pemerintah Daerah kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2), Biro Hukum SetdaprovSU sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban Urusan Wajib yang dilaksanakan yaitu Urusan Wajib Pemerintahan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum SetdaprovSU didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya

aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum terlaksananya dengan baik penyusunan produk hukum daerah khususnya di Kabupaten/Kota.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
4. Belum optimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
6. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
7. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik
9. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Biro Hukum Setdaprovsu.
10. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Hukum Setdaprovsu dengan SKPD lain.

Dalam perkembangan kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Biro Hukum Setdaprovsu diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk

mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi dengan SKPD lain.

Berikut adalah Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021
Biro Hukum SetdaprovSU
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	-	-	500 Produk hukum	880 Produk hukum	880 Produk hukum	880 Produk hukum	1.334 produk hukum	250 Produk hukum	880 Produk hukum	900 Produk hukum	-
2	Jumlah rancangan produk hukum daerah Kab/ Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi	-	-	70 Ranperda Kab/ Kota	700 Perda/ Perkada	700 Perda/ Perkada	700 Perda/ Perkada	71 Ranperda Kab/ Kota	100 Perda/ Perkada	700 Perda/ Perkada	700 Perda/ Perkada	-
3	Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan	-	-	30 Produk hukum	30 Produk hukum	30 Produk hukum	30 Produk hukum	30 produk hukum	10 Produk hukum	30 Produk hukum	30 Produk hukum	-
4	Jumlah penanganan perkara hukum di Pengadilan	-	-	25 perkara	25 perkara	25 perkara	25 perkara	31 perkara	20 perkara	25 perkara	25 perkara	-
5	Jumlah penanganan perlindungan HAM	-	-	10 kasus	15 kasus	15 kasus	15 kasus	14 kasus	10 kasus	15 kasus	15 kasus	-

3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Biro Hukum SetdaprovSU sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Sumatera Utara.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sesuai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 adalah :

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dari rumusan Visi ini diharapkan tercipta masyarakat Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat disegala aspek kehidupan sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi yang begitu dinamis dan perkembangan yang begitu pesat baik dibidang ekonomi, sosial politik, budaya maupun aspek kehidupan lainnya sehingga pada suatu saat nanti terwujud masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 5 (lima) Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 guna melaksanakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu terdapat pada Misi Ke-2 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”

Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya hukum tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

Dari pernyataan visi tersebut diharapkan mampu menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompotensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Nasional, Biro Hukum Setdaprovsu menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran Aparatur dan masyarakat akan hak dan kewajiban;

2. Belum terlaksananya dengan baik Penyusunan Produk Hukum Daerah khususnya di Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah belum optimal;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah belum maksimal;
5. Belum maksimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota;
6. Masih rendahnya wawasan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah;
7. Belum maksimalnya Penyuluhan Hukum;
8. Belum terlaksananya dengan Pembinaan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
9. Masih terbatasnya kemampuan Aparatur menyusun produk hukum daerah di Kabupaten/Kota.

Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah telah dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Biro Hukum Setdaprovsu dirumuskan melalui Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2019-2023 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Adapun strategi Biro Hukum Setdaprovsu untuk menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

1. Penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai sesuai bidang tugasnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam memberdayakan pegawai.
2. Menumbuhkan komitmen bersama dalam konsistensi tindakan pada setiap pelaksanaan tugas.
3. Pengelolaan data-data penting secara lebih akurat untuk penyusunan perencanaan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan kinerja serta penyusunan bahan monitoring dan evaluasi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana hukum untuk pelaksanaan perencanaan dalam melakukan pengkajian ulang produk hukum daerah.

5. Peningkatan koordinasi atas pelanggaran HAM dikalangan aparaturnya penegak hukum, lembaga sosial dan Perguruan Tinggi.
6. Proses perancangan, perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu melibatkan kajian akademis dari kalangan Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial dan Asosiasi sehingga proses penerbitan Perda dapat diterima masyarakat;
7. Perlu adanya peningkatan peranan Panitia RanHAM Provinsi Sumatera Utara untuk memonitoring pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dengan bekerjasama instansi aparat penegak hukum.
8. Diperlukan Peningkatan dan pengembangan metode teknis penyuluhan hukum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
9. Peningkatan sosialisasi Produk Hukum Daerah sebagai upaya pelayanan informasi kepada masyarakat dan aparaturnya.
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparaturnya yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel.
11. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu.
12. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
13. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan *e-Government* dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kinerja pembangunan.
14. Pengembangan sumberdaya aparaturnya untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
15. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas.
16. Memberdayakan peran SDM Aparaturnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan.
17. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran.
18. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, memuat program dan kegiatan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing SKPD masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing SKPD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Gubernur).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, maka penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang diperuntukkan bagi Biro Hukum Setdaprovsu setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana Biro Hukum Setdaprovsu.

Demikian halnya juga program dan kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu, program dan kegiatan prioritas tahun 2024, yang masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan, terdapat beberapa perubahan dan penambahan pada program dan kegiatan. Perubahan tersebut antara lain adalah perubahan target capaian kinerja dan perubahan nomenklatur/tata nama kegiatan dan bertambahnya kegiatan.

Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, Biro Hukum Setdaprovsu mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk dimasukkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Usulan program dan kegiatan dari Biro Hukum Setdaprovsu tersebut, merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan visi dan misi Biro Hukum Setdaprovsu.

Dalam Tabel 2.4. dapat dilihat program dan kegiatan pada Biro Hukum Setdaprovsu yang telah tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan analisa kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Hukum Setdaprovsu pada Tahun 2023 tidak melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Biro Hukum Setdaprovsu.

Tabel. 7
Usulan Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu Dari Para Pemangku
Kepentingan
Provinsi Sumatera Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tidak Ada			

D. Biro Perekonomian

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Perekonomian Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Perekonomian Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Perekonomian Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Setdaprovsu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Setdaprovsu selama tahun 2022 dan perkiraan target pada tahun 2023.

Biro Perekonomian Setdaprovsu terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), indikator keluaran (output) dan hasil (outcome). Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Biro Perekonomian SetdaprovSU telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. **3.355.288.200,-** dan serapan keuangan sebesar Rp. **3.257.058.400,-** atau 97,07%, dan untuk Tahun 2023 akan disajikan rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2022 antara Kepala Biro Perekonomian SetdaprovSU dengan Gubernur Sumatera Utara, telah ditetapkan Prioritas Program yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Peningkatan Program Pemberdayaan BUMD dengan Sasaran Strategis berupa **Mewujudkan stabilitas dan penguatan ekonomi daerah** dan **Meningkatnya fungsi pemberdayaan terhadap BUMD**. Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2022 terdiri dari:

1. Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan.
2. Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat.

Pada Tahun 2022, indikator Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang diimplementasikan ini terealisasi **100.00%** sedangkan indikator Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat terealisasi sebanyak **71.43%**. Dan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 belum ada realisasi pada indikator tersebut.

- ❖ Pencapaian indicator Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan dihitung dengan formula kebijakan yang diimplementasikan dibagi dengan jumlah kebijakan yang dihasilkan dikali 100 %. Adapun beberapa kebijakan yang dihasilkan dan telah diimplementasikan oleh kab/kota maupun OPD terkait antara lain:
 - Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 541/3268 tanggal 23 Maret 2022 tentang Pengendalian Pendistribusian jenis bahan bakar tertentu jenis minyak solar bersubsidi di Provsu.
 - Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/219/KPTS/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Progam Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah Provsu Tahun 2022.
 - Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/233/KPTS/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2022-2024.
 - Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 500/5802 tanggal 02 Juni 2022 tentang Permintaan Data Program Kegiatan yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022.
 - Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 521/10269 tanggal 5 September 2022 tentang Himbauan menanam cabe merah secara mandiri di pekarangan masing-masing yang merupakan upaya mengatasi terjadinya kekurangan pasokan cabai merah.
 - Perda pembentukan Jamkrida yang nantinya Jamkrida memiliki fungsi melaksanakan kegiatan usaha dibidang penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi demi peningkatan ekonomi pada UMKM dan Koperasi, namun Perda Pendirian PT Jamkrida Provsu masih dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi kebijakan tersebut diperoleh dari laporan kab/kota maupun OPD yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut.

- ❖ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki 6 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdiri dari:
 1. PT Bank Sumut
 2. PT Dhirga Surya Sumut
 3. PT Perkebunan Sumatera Utara
 4. PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ Provsu)
 5. PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU)
 6. Perumda Tirtanadi Provsu

- ❖ 1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu Rumah Sakit Jiwa Mhd. Ildrem

Pencapaian indikator Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat dihitung dengan formula jumlah BUMD dan BLUD dengan kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat dibagi dengan jumlah BUMD dan BLUD yang dibina dikali 100%. Adapun untuk BUMD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat dilihat dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Biro Perekonomian pada tahun 2022. Sedangkan untuk BLUD dapat dilihat dari opini terhadap laporan keuangan BLUD.

Guna mencapai Indikator Kinerja tersebut Biro Perekonomian Setdaprovsu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, Lembaga-lembaga lain, BUMD terkait dan SKPD Provsu terkait.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Biro Perekonomian dari pelaksanaan kegiatan penunjang indikator kinerja utama tersebut antara lain:

1) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro.

Beberapa kinerja yang telah dilakukan oleh Biro Perekonomian antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi, evaluasi dan high level meeting sebagai cara untuk mengetahui permasalahan inflasi dan kebijakan serta langkah konkrit yang diambil dalam pengendalian inflasi daerah Sumatera Utara.

2. Melaksanakan pasar murah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu, BULOG dan BUMD yang dimiliki oleh Pemprov su seperti PD AIJ Provsu dan PT Dhirga Surya.
3. Melaksanakan sidak pasar, monitoring pasokan dan harga ke Gudang distributor seperti ke PT Musim Mas, Permata Hijau Grup dan PT Salim Ivomas yang bekerjasama dengan Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara.
4. Menyusun Pergub Bantuan Langsung Tunai sebagai tindak lanjut Percepatan Realisasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk Pengendalian Inflasi Daerah di Sumatera Utara.
5. Menyusun pembaharuan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara.

Berikut gambaran perkembangan inflasi pada tahun 2022

Tabel. 8
Perkembangan Inflasi pada Tahun 2021 Biro Perencanaan Setdaprov su

Kota Inflasi	Inflasi (Umum) 2022												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Tahunan
KOTA SIBOLGA	1.53	-0.21	0.93	0.38	0.85	1.12	1.07	-0.02	0.33	-1.09	-0.05	1.44	6.43
KOTA PEMATANG SIANTAR	0.96	0.18	0.77	0.39	0.62	1.36	0.04	-0.79	1.50	-0.54	-0.08	1.61	6.16
KOTA MEDAN	1.04	-0.28	0.68	0.43	0.76	1.39	0.27	-0.25	0.98	-0.47	-0.13	1.54	6.10
KOTA PADANG SIDIMPUAN	0.90	0.37	1.11	0.78	0.77	1.29	0.59	-0.31	0.99	-0.61	-0.27	0.64	6.40
KOTA GUNUNG SITOLI	0.93	0.43	0.39	0.22	0.05	2.72	1.81	-1.43	0.61	-1.48	-0.37	1.79	5.74
SUMATERA UTARA	1.03	-0.21	0.71	0.44	0.74	1.40	0.31	-0.30	1.00	-0.51	-0.13	1.50	6.12
NASIONAL	0.56	-0.02	0.66	0.95	0.40	0.61	0.64	-0.21	1.17	-0.11	0.09	0.66	5.51

2) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

Biro perekonomian telah menyusun Peraturan Daerah Pembentukan Jamkrida yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Program Kerja TPAKD Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), Pemerintah telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai dengan 30 Desember 2022 realisasi KUR di Provinsi Sumatera Utara adalah

sebesar Rp 18,752,529,259,648 meningkat dibandingkan tahun 2021 Rp. 13,425,144,096,003 dengan jumlah debitur 466,639.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu:

1. Rapat Koordinasi terkait Pemerintah Daerah Kab/Kota se Sumatera Utara dengan Bank Syariah. Rapat Koordinasi terkait Pemerintah Daerah Kab/Kota se Sumatera Utara agar berkejasama dengan Bank Syariah Indonesia agar lebih fokus terhadap peningkatan pembiayaan Syariah.
2. Rapat Koordinasi Keuangan Ekonomi Syariah. Rapat dalam rangka pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Utara dengan Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS). Selanjutnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah akan segera dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang melibatkan instansi terkait dan stakeholder.
3. Kegiatan Peningkatan Pemasaran UMKM Go Online melalui Onboarding di Marketplace. Rapat dalam rangka pemasaran UMKM Go Online dilakukan dengan Onboarding di Marketplace yang bertujuan untuk membuka peluang pasar baru dan lebih luas bagi UMKM di Sumatera Utara, sekaligus sosialisasi dukungan pembiayaan bagi UMKM. Rapat dilanjutkan dengan mendaftarkan UMKM masuk ke Marketplace.
4. Rapat Pleno Semester II Tahun 2022. Rapat dalam rangka Evaluasi Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2022 dan penyusunan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2022 terkait Desa Wisata, Desa Inklusi dan BUMDES sekaligus sosialisasi Website TPAKD Provsu serta manfaatnya. Rapat dilanjutkan dengan mendaftarkan UMKM masuk ke Marketplace.

3) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Biro Perekonomian dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD yaitu:

1. Melakukan rapat-rapat koordinasi/FGD guna peningkatan kinerja BUMD Provinsi Sumatera Utara
2. Pada tahun 2022, Biro Perekonomian memfasilitasi pelaksanaan seleksi Direktur dan Direksi PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dan PT. Perkebunan Sumatera Utara. Dengan pergantian Direktur dan Direksi beberapa BUMD diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan BUMD sehingga menjadi BUMD yang lebih sehat
3. Biro Perekonomian juga telah menyusun Perda Pendirian PT Jamkrida Provsu dan sedang dalam fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

4) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

Tahun 2022 Biro Perekonomian SetdaprovSU telah melaksanakan Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Evaluasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dan Manajemen Aset Pada Rumah Sakit Milik Daerah. Pada rapat koordinasi tersebut didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Mendorong Kab/ Kota Provinsi Sumatera Utara harus segera melakukan pembentukan BLUD pada RSUD
2. Bagi Kab/ Kota yang sudah terbentuk BLUD pada RSUD agar membuat peraturan Kepala Daerah untuk menyempurnakan BLUD tersebut
3. BLUD harus menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan pada saat melaksanakan anggaran tersebut jangan fiktif karena hanya untuk menghabiskan anggaran sehingga terjadi pemborosan serta menyempurnakan Renstra 5 Tahun kedepannya

4. BLUD harus menyiapkan dan mempunyai SPI, Dewan Pengawas, Pembentukan unit- unit usaha serta unit pengadaan barang dan jasa
5. Mengutamakan Pelayanan kepada pasien atau pun masyarakat dengan orientasi kepuasan kepada masyarakat sebagai fungsi sosial
6. Salah satu tujuan BLUD dibentuk untuk Enterprising The Government atau penerapan kewirausahaan
7. Melakukan optimalisasi aset BLUD melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu dengan cara mengadministrasikan, melaporkan, menilai, mendayagunakan, serta memberikan nilai tambah dan income atau pemasukan bagi Pemerintah Daerah.

5) Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan

Biro Perekonomian telah melaksanakan beberap kali Rapat Koordinasi antara lain:

- Rapat Koordinasi Pengawasan dan Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi harus menggunakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah di *breakdown* oleh pemerintah Kabupaten / kota sebagai acuan oleh Produsen, Distributor, Kios dan KP3 Kabupaten / Kota
 - Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu dan dilakukan evaluasi per tiga bulan. Hasil evaluasi apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan sanksi dan teguran.
 - Untuk ketepatan HET Pupuk Bersubsidi di daerah, dilakukan pengawasan dan pembinaan setiap waktu oleh Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida)

- Kabupaten / Kota dan diberikan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran
- Tim KP3 Kabupaten / Kota memberikan laporan kegiatan pengawasan dan pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Provinsi Sumatera Utara setiap bulan, melalui Biro Perekonomian Setdaprovsu.
 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu apabila memungkinkan, akan melakukan pelatihan PPNS untuk pupuk dan pestisida.
 - Pemerintah Kabupaten / Kota mengajukan anggaran di P-APBD T.A 2022 untuk bantuan pengadaan pupuk organik.
 - Menambah alokasi anggaran KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten / Kota untuk kegiatan koordinasi, pelaporan dan monitoring serta evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi.
 - Produsen Pupuk Bersubsidi, memberikan laporan penyaluran pupuk bersubsidi bulanan, triwulan, semester ke Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten / Kota dan KP3 Provinsi Sumatera Utara.
 - Produsen aktif mengawasi dan menindaklanjuti seluruh laporan dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten / Kota.
- Rapat Koordinasi Pengembangan Pupuk Organik di Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan tanggal 21 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Kabupaten / Kota melakukan evaluasi pelaksanaan pupuk organik yang telah dilaksanakan di lapangan. Hasilnya disampaikan 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan rapat koordinasi, kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Perekonomian Setdaprovsu.
 - Pemerintah kabupaten / Kota mempersiapkan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok tani atau bersama-sama dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) untuk

mengimplementasikan penggunaan pupuk organik dalam bentuk pilot projek, kemudian juga dibarengi dengan berbagai kajian-kajian untuk mendapatkan hasil yang optimal.

- Akan dibuat kajian mendalam, disesuaikan dengan kondisi daerah Provinsi Sumatera Utara, tentang penggunaan, potensi dan kebutuhan pupuk organik.
 - Pemerintah Kabupaten / Kota agar menganggarkan terkait dengan pengadaan pupuk organik di daerah masing-masing.
- Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan tanggal 03 November 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Aplikasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Utara tergantung pada input data yang dilakukan oleh Admin Kabupaten/Kota, sehingga perlu kerjasama yang baik.
 - Akan dilakukan evaluasi ke depan bagaimana perkembangan atau keberhasilan penerapan aplikasi ini.
 - Akan ada pengembangan dan juga sinergi atau link dengan aplikasi lainnya sehingga pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi terlaksana dengan baik.

6) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Biro Perekonomian telah melaksanakan monitoring ke beberapa kabupaten antara lain: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba dan Kabupaten Simalungun.

Ada beberapa permasalahan di sekitaran Danau Toba yang didapat antara lain:

1. Belum terkandalinya kegiatan pemanfaatan ruang danau
2. Belum teringrasinya program pengelolaan Danau Toba kedalam dokumen perencanaan
3. Menuruannya kualitas air danau

4. Adanya material padat / sedimen yang masuk ke danau
5. Menurunnya keanekaragam hayati
6. Menurunnya keanekaragaman debit air Danau Toba
7. Kerusakan Ekosistem Danau
8. Banyaknya sampah di danau toba
9. Lahan kritis, banjir, erosi dan sedimen
10. Pencemaran limbah pada DTA
11. Keterbatasan data dan informasi danau yang terbaharui
12. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
13. Kelembagaan yang belum optimal

7) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Bersubsidi serta Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi Sumatera Utara dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:
 - PT. Pertamina MOR I Medan, menyampaikan data realisasi LPG Tabung 3 Kg serta JBT dan JBKP setiap bulan ke kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Perekonomian SetdaprovSU, per titik serah per Kabupaten/Kota untuk di koordinasikan dengan Pemerintah kabupaten / Kota se- Sumatera Utara.
 - Kuota LPG tabung 3 Kg merupakan peruntukan bagi Masyarakat Miskin dan Usaha Mikro, sehingga Masyarakat Mampu, Restoran dan Rumah Makan Besar dilarang menggunakan LPG Tabung 3 Kg. Pemerintah Kabupaten / Kota berhak mengatur pengguna LPG Tabung 3 Kg di daerah masing-masing.
 - Pemerintah Kabupaten / Kota agar pro aktif melakukan pengawasan ke Agen dan Pangkalan dengan mengawasi Penggunaan/Pengisian *Logbook* dan nomor ID Agen dan Pangkalan.
 - Apabila terdapat Agen dan Pangkalan yang tidak memiliki Nomor ID, maka dapat diusulkan oleh pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota untuk ditutup dan tidak dilayani oleh PT. Pertamina MOR I untuk pengisiannya.
- Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyaluran LPG Tabung 3 Kg serta BBM JBT dan JBKP di daerah agar dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Perekonomian SetdaprovSU.
- Rapat Koordinasi Membahas Permohonan DPC Hiswana Migas Sumatera Utara Agar Sertifikat Laik Fungsi Tidak Menjadi Persyaratan Pembaharuan Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg dengan kesimpulan sebagai berikut:
- PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, dalam melakukan perpanjangan/pembaharuan kontrak kemitraan/keagenan dengan Agen LPG 3 Kg di Sumatera Utara, agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana disebutkan pada Pasal 346 ayat (1) bahwa Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini izinnnya dinyatakan masih tetap berlaku. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izinnnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin
- Tahun 2022 Biro Perekonomian telah Melakukan Koordinasi dan Monitoring terkait dengan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Penyaluran LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi dan ditemui beberapa permasalahan antara lain:
1. Kendala / Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat terkait dengan penyaluran LPG 3 Kg adalah belum terpetakannya dengan baik keberadaan pangkalan LPG 3 Kg, masih banyak yang berdekatan sehingga mengakibatkan kesulitan dalam

penyaluran LPG 3 Kg. Diharapkan kepada Agen agar tidak mengeluarkan izin pangkalan dengan mudah tanpa memetakan pangkalan yang ada terlebih dahulu

2. Permasalahan yang dihadapi di Kota Tanjungbalai adalah rute pangkalan yang tidak bisa diakses oleh Armada/angkutan agen karena masuk sampai ke gang kecil, sehingga dilakukan transit dan dilangsir dengan menggunakan becan, hal ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman.
3. Kendala / Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara terkait dengan penyaluran LPG 3 Kg adalah sulitnya memonitor penyaluran yang dilakukan oleh kios pengecer yang tidak diatur dalam mekanisme penyaluran sehingga memberlakukan harga yang jauh diatas HET yang ditetapkan.
4. Kendala / Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan penyaluran LPG 3 Kg adalah masih ada beberapa Pangkalan LPG 3 Kg yang menjual LPG 3 Kg diatas HET yang telah ditetapkan. Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Instruksi Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengendalian Pendistribusian BBM Tertentu dan LPG 3 Kg di Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Kendala / permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sibolga terkait dengan penyaluran LPG Tabung 3 Kg adalah tidak diketahui atau tidak ada data pembagian kuota bulanan setiap agen maupun pangkalan dari PT. Pertamina ke Pemerintah Daerah Kota Sibolga, sehingga pelaksanaan penyaluran sulit diawasi. Kemudian penyampaian laporan penyaluran dari Agen dan Pangkalan masih sering terlambat.

- Penyampaian Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 541/3267 tanggal 23 Maret 2022 tentang Pengendalian

Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar Bersubsidi Di Provinsi Sumatera Utara, yang menyampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta mengacu kepada Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu dilakukan pengendalian pendistribusian JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi di Penyalur SPBU agar tepat sasaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Dinas milik Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, TNI/Polri dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi, kecuali kendaraan untuk pelayanan umum seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
- b. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan, kehutanan, dan pertambangan termasuk dan tidak terbatas pada angkutan CPO, angkutan kayu, angkutan tambang batuan dan batu bara, angkutan *mixer* semen baik dalam keadaan bermuatan atau kosong dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi.
- c. Untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air, dan Pelayanan Umum dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi tanpa melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi/Dinas yang berwenang.
- d. Pembelian dengan menggunakan jerigen atau sejenisnya dilarang, kecuali untuk keperluan usaha sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) dengan syarat melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi/Dinas yang berwenang.
- e. Penerbitan Surat Rekomendasi yang dimaksud pada poin 3 dan 4 mengacu kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir

Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

- f. Pemerintah Kabupaten / Kota agar pro aktif melakukan pengawasan penyaluran BBM di Kabupaten / Kota, antara lain terkait dengan rekomendasi dari SKPD.
- g. Batas pembelian JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi adalah Kendaraan Pribadi roda 4 (empat) paling banyak 40 liter/hari/kendaraan, Kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 60 liter/hari/kendaraan dan Kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 100 liter/hari/kendaraan.
- h. PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas wajib menyediakan Jenis Minyak Solar Non Subsidi dalam jumlah yang cukup di setiap penyalur SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi antrian.
- i. Untuk terlaksananya Surat Edaran ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Provinsi Sumatera Utara, instansi/Dinas pemberi Surat Rekomendasi Pembelian JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi, PT. Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas Sumatera Utara diminta melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan penertiban bersama pihak Kepolisian setempat.
- j. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan 8 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara garis dapat digambarkan beberapa capaian kinerja Biro Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2022 antara lain:

1. Telah menyusun laporan pelaksanaan Road Map Pengendalian Inflasi
2. Telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
3. Menyusun aplikasi SIM Penyaluran Pupuk Bersubsidi
4. Menyusun Laporan pelaksanaan Road Map Percepatan Akses Keuangan Daerah
5. Menyusun Aplikasi Layanan Keuangan dan Usaha UMKM
6. Melaksanakan Rapat koordinasi peningkatan pemasaran UMKM go online melalui onboarding di marketplace
7. Menyusun Peraturan Daerah tentang Pendirian PT Jamkrida Sumatera Utara.
8. Seleksi Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Sumatera Utara masih berlangsung/proses
9. Telah melakukan rapat koordinasi membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Premium di Provinsi Sumatera Utara guna mencari solusi dan tindak lanjut.
10. Telah melakukan Monitoring dan Rakor KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida)
11. Melaksanakan Rakor pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG
12. Sudah dilakukan business matching dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka meningkatkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga diperoleh peningkatan realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sebesar Rp 18,752,529,259,648 meningkat dibandingkan tahun 2021 Rp. 13,425,144,096,003 dengan peningkatan 39.68%
13. Telah melaksanakan Evaluasi Tingkat Kesehatan Keuangan 2021 BUMD
14. Telah melaksanakan Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) BUMD
15. Menyusun aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) BUMD

16. Menyusun aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) ASET BUMD
17. Menyusun Evaluasi Penyertaan Modal BUMD Tahun Buku 2021

Beberapa prestasi yang dicapai Biro Perekonomian Tahun 2022:

1. Penghargaan dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kategori lembaga pendukung Pemerintah Provinsi.
2. Penghargaan penyelesaian TLHP tepat waktu dari Inspektorat Provsu.

Sedangkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh

Biro Perekonomian sampai dengan bulan Juni 2023 antara lain:

1. Menyusun Perda Jamkrida dan sudah dalam tahap Proses Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Penyusunan Perda Merger BUMD PD. AIJ Provsu dengan PT. PPSU dan sudah dalam Pembahasan Bapemperda DPRD-SU.
3. Proses penyusunan Kebijakan Forum Koordinasi CSR Untuk Pemberdayaan UMKM.
4. Telah melaksanakan Evaluasi Tingkat Kesehatan Keuangan 2022 BUMD.
5. Telah melaksanakan Evaluasi Penerapan GCG BUMD.
6. Melaksanakan Pembinaan dalam Penyusunan KPI dan RKA BUMD Tahun 2023.
7. Telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Penyaluran LPG 3 Kg serta BBM JBT dan JBKP TW I.
8. Menerbitkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara tentang Pengendalian Pendistribusian BBM Tertentu minyak solar di Sumatera Utara.
9. Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Penyaluran LPG dan BBM JBT TW II.
10. Telah melaksanakan Rakor TPID Triwulan I dan Rakorprov TPID/High Level Meeting.
11. Membuat Laporan Perkembangan Harga Bapokting setiap hari
12. Menyusun Road Map Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2023.

13. Menerbitkan SK Gubsu tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sumatera Utara.
14. Penetapan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masih dalam proses penilaian tim.

Pencapaian Anggaran sampai dengan Juni 2023

Berikut tabel realisasi anggaran Biro Perekonomian Setdaprovsu pada tahun 2022 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2023:

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Provinsi sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang dievaluasi	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	97.71%	1,214,509,700	100%	1,721,954,700	31.37%	540,232,600
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik</i>	<i>12 bulan</i>	<i>385,338,400</i>	<i>12 bulan</i>	<i>391,238,400</i>	<i>6 bulan</i>	<i>158,346,000</i>
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	391,950,000	12 Dokumen	391,238,400	6 dokumen	158,346,000
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi</i>	<i>15 orang</i>	<i>15,750,000</i>	<i>20 orang</i>	<i>142,020,000</i>	-	0
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	15,750,000	20 Orang	142,020,000	-	0
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Biro Perekonomian</i>	<i>12 bulan</i>	<i>790,527,450</i>	<i>12 bulan</i>	<i>1,110,946,300</i>	<i>6 bulan</i>	<i>365,386,600</i>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			15 Paket	70,000,000		

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1. 1448 unit 2. 3955 kotak	232,121,800	2500 paket	364,934,300	2779 Paket	96,588,100	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	87,111,800	12 paket	99,988,240	3 paket	52,234,200	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 bahan bacaan	11,465,000	6 Dokumen	100,244,760	6 Dokumen	4,271,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. 36 kali 2. 11 Kali	459,828,850	35 Laporan	475,779,000	24 Laporan	212,293,300	
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya pendistribusian surat-menyerat Biro Perekonomian</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>5,393,850</i>	<i>350 Surat</i>	<i>22,750,000</i>	<i>150 Surat</i>	<i>1,500,000</i>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	387 Surat	5,393,850	12 Laporan	22,750,000	6 Laporan	1,500,000	
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara secara rutin</i>	<i>33 unit</i>	<i>17,500,000</i>	<i>10 unit</i>	<i>55,000,000</i>	<i>30 unit</i>	<i>15,000,000</i>	

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	17,500,000	10 unit	55,000,000	30 unit	15,000,000	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	83.68%	2,042,548,700	100%	2,966,045,300	35.49%	1,052,790,800	
		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	1. <i>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Perekonomian</i>	63%	780,330,300	2 dokumen	1,275,740,000	1 dokumen	415,060,000	
			2. <i>Jumlah Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Perekonomian</i>			12 Laporan		3 Laporan		
			3. <i>Jumlah kesesuaian pelaksanaan kebijakan perekonomian</i>			2 Dokumen		1 Dokumen		
			4. <i>Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian</i>			2 Laporan		1 Laporan		
			5. <i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>			2 Dokumen				

		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	14 kab/kota 1 Roadmap Pengendalian Inflasi 3 Kali Rakor	342,507,300	2 Dokumen	662,200,000	1 dokumen	164,831,000	
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Publikasi 28 Kab/Kota 1 Roadmap TPAKD 5 kali rakor	437,823,000	2 Dokumen	613,540,000	1 dokumen	250,229,000	
		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	1. <i>Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA</i>	77%	436,345,200	3 dokumen	740,970,900		322,626,000	
			2. <i>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Pengelolaan SDA</i>			3 dokumen		1 dokumen		
			3. <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan SDA</i>			2 Laporan		1 Laporan		

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Aplikasi pengawasan pupuk 15 Kab/kota 3 Kali rakor	268,049,000	12 dokumen	310,755,000	13 dokumen	123,990,000
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	7 kab/kota	42,480,000	8 dokumen	144,536,950	10 Dokumen	66,252,000
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	16 kab/kota 1 kali rakor	125,816,200	12 dokumen	285,678,950	13 Dokumen	132,384,000
		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolan, Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD</i>	<i>111.11%</i>	<i>825,873,200</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>949,334,400</i>	<i>43.89%</i>	<i>315,104,800</i>
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Aplikasi 1 Aplikasi 17 Kab/Kota 1 Perda Jamkrida	425,742,100	15 dokumen	424,712,600	14 Dokumen	99,204,000
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik	20 kab/kota 1 BUMD	200,104,100	12 dokumen	253,678,200	10 Dokumen	76,774,000

		Minum, Limbah dan Sanitasi	Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi						
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	16 kab/kota 1 Kali	200,027,000	12 dokumen	270,943,600	11 Dokumen	139,126,800
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					3,257,058,400		4,688,000,000	33.98%	1,593,023,400

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- d. penyusunan kebijakan ekonomi makro dan mikro daerah;
- e. penyusunan dan penyajian data dan informasi ekonomi makro dan mikro daerah;
- f. fasilitasi kegiatan pengendalian inflasi daerah;
- g. fasilitasi kegiatan percepatan akses jasa keuangan ke usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- h. fasilitasi pemberdayaan kelembagaan/ asosiasi/ perkumpulan perusahaan/ pengusaha dengan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- i. fasilitasi kerjasama dan kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil

- dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- j. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
 - l. fasilitasi kegiatan pengembangan akses pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
 - m. penyelenggaraan administrasi Biro Perekonomian;
 - n. pengelolaan kepegawaian Biro Perekonomian;
 - o. pengelolaan keuangan Biro Perekonomian;
 - p. pengelolaan barang/aset Biro Perekonomian;
 - q. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.

Kepala Biro Perekonomian mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian;
- c. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Biro Sekretariat Daerah, perangkat daerah dan/atau instansi terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian;
- d. melaksanakan pendistribusian tugas ke Bagian pada Biro Perekonomian;
- e. melaksanakan bimbingan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja satuan pelaksana dan jajaran sumber daya manusia Biro Perekonomian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Biro Perekonomian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :

- a. Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri dari :

1. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
 2. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
 3. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
1. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 2. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
- c. Bagian BUMD dan BLUD, terdiri dari :
1. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 2. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 3. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.

Tabel. 10
Komposisi Sumber Daya Manusia Biro Perekonomian berdasarkan pendidikan/
fungsional jabatannya antara lain :

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	1
2	S-2	6
3	S-1	13
4	Diploma III	5
5	SLTA	2
6	SLTP	-
	Jumlah	27

Tabel. 11
Komposisi Sumber Daya Manusia Biro Perekonomian berdasarkan jenjang
jabatannya antara lain :

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Pejabat Fungsional Ahli Madya	3
3.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	8
3.	Eselon IV	1
	Jumlah	13

Tabel. 12
Komposisi Sumber Daya Manusia Biro Perekonomian berdasarkan golongan
antara lain :

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	20
3	Golongan II	-
4	Golongan I	-
Jumlah		27

Tabel. 13
Komposisi Sumber Daya Manusia Biro Perekonomian berdasarkan jenis kelamin
antara lain :

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	14
2	Perempuan	13
Jumlah		27

Adapun analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Biro Perekonomian Setdaprovsu berdasarkan Indikator Kinerja dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel. 14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Setdaprovsu

No	Indikator	SPM/Standar Minimal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan			n/a	n/a	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang sehat			n/a	n/a	n/a	100 persen	100 persen	71,43 persen	100 persen

Tabel. 15
Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	SPM/Standar Minimal	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi			
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase BUMD yang memiliki			100%	100%	100%	71,43%	100%	100%	100%	100%

	kinerja keuangan yang sehat										
3.	Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi			100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, jika hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang pula.

Isu-Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setdaprovsu adalah:

1. Belum optimalnya dukungan Kebijakan Pemerintah daerah dalam mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan Daerah yang tinggi dan berkualitas.
2. Belum optimalnya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
3. Belum optimalnya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan BUMD/BLUD untuk mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
4. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga kurang tepat waktu.

Sedangkan untuk tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan yaitu:

1. Peluang (*Opportunities*)

Peluang-peluang yang dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja Biro Perekonomian Setdaprovsu adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian.
- c. Adanya Pelaksanaan Kebijakan Satu Data.

2. Ancaman/Tantangan (*Threat*)

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Biro Perekonomian yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan

serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, ditemukan tantangan dalam pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur yang profesional di bidangnya.
- b. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Kebijakan di bidang perekonomian.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dalam rangka E-Government Bidang Perekonomian;
- d. Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Perekonomian

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rancangan Awal		Indikator	Hasil Analisis Kebutuhan	
	Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan						
	Sasaran : Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	90%	1,775,000,000	Persentase pemenuhan layanan administrasi	90%	1,589,694,400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 bulan	500,000,000	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 bulan	451,051,200
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	12 dokumen	500,000,000			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	451,051,200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian	22 orang	150,000,000	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian	22 orang	71,954,700

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	62,304,700
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	150,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	9,650,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	12 bulan	1,025,000,000	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	12 bulan	1,046,688,500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	200,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	123,449,150
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500 Paket	200,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500 Paket	280,125,262
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	110,394,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	25,000,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	9,150,088

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	500,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	523,570,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	50,000,000			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50,000,000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	10 Unit	50,000,000	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	10 Unit	20,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50,000,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	3,050,000,000	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	2,910,305,600
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90%	1,200,000,000	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90%	1,064,017,000
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan	2 Dokumen	650,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan	2 Dokumen	515,734,000

		Ekonomi Makro			Ekonomi Makro		
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	550,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	548,283,000
	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>850,000,000</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>849,567,000</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 dokumen	325,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 dokumen	324,122,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8 dokumen	200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8 dokumen	201,747,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 dokumen	325,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 dokumen	323,698,000

	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>1,000,000,000</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>996,721,600</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	15 dokumen	400,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	15 dokumen	398,755,600
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	12 dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	12 dokumen	298,914,000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum	12 dokumen	300,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12 dokumen	299,052,000

		Daerah					
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				4,825,000,000			4,500,000,000

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Perekonomian SetdaprovSU akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, asosiasi-asosiasi maupun dari Perangkat Daerah kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil Reses DPRD.

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2022 dan sampai dengan triwulan I dan II tahun 2023 serta perkiraan target pada tahun 2024.

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan sampai dengan triwulan I dan II tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pada Tahun 2022 berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 100% terealisasi 100%, realisasi anggaran sebesar 97,10%.
2. Kegiatan pada Triwulan I dan II tahun 2023 berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 100% terealisasi 70,73% dengan realisasi anggaran 42,66%.

B. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana/fungsional umum yang kompeten untuk mendukung tugas-tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

C. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dari kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

1. Keterbatasan personil untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
2. Pengguna (PA, KPA, dan PPK) belum memahami ketentuan pengadaan barang/jasa sehingga kegiatan terlambat dilaksanakan.

D. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan usulan kepada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk penambahan personel dari OPD PemprovSU yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1 untuk diusulkan perpindahan jabatan dari jabatan lain menjadi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta Fungsional Umum.
2. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan melaksanakan Bimtek kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tabel T-C.29 (terlampir).

2. Analisa Kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU

Tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun 2022 dan rencana kerja sampai dengan triwulan I dan II tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta pelayanan proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Renstra.

Tabel 17
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2021 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023 (TW-II)	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	10		11	12	13
1	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa			100%	100%	100%	100%	84,31%	-	-	
2	17 Standarisasi LPSE			100%	100%	100%	100%	57,14%	-	-	

3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

- a. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.
- b. Dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisik setiap triwulan, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- c. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
- d. Komitmen dan kepedulian yang tinggi dari OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun UKPBJ Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- e. Melibatkan UMK dan Penyedia melalui kegiatan yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga Kegiatan dan Program bisa tercapai.

Sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, seperti Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta membantu Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah meriviu rancangan awal RKPD, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang dapat membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Rencana kerja 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah mengusulkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan usulan sebesar Rp.5.604.781.941,- (Lima milyar enam ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh

satu rupiah) yang nantinya dapat direalisasikan kepada setiap program dan kegiatan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagaimana tabel T-C.21 (terlampir).

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel. 18
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Provinsi Sumatera Utara
Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Ada					

F. Biro Administrasi Pembangunan

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 Dan Capaian Renstra PD

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU selama tahun 2022 dan perkiraan target pada tahun 2024.

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2022 ada beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan target kinerja 100% terealisasi 100%, jika dikaitkan dengan anggaran terealisasi sebesar 88.13%.
 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah, dengan target kinerja 100% terealisasi 100%, jika dikaitkan dengan anggaran terealisasi sebesar 83.06%.
- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja dengan tingginya aktivitas Pegawai dalam memfasilitasi kegiatan Pembangunan.

- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dari kegiatan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU, antara lain:

1. Kurangnya kepedulian Admin Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penginputan pada Aplikasi PRP2SUMUT.

2. Kegiatan dalam rapat koordinasi pembentukan perumusan kebijakan teknis pembangunan yang dibatalkan.
- d. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan penambahan Pegawai agar pelaksanaan fasilitasi kegiatan Pembangunan berjalan dengan baik.
2. Membuat Kembali rapat koordinasi pembentukan perumusan kebijakan teknis pembangunan yang dibatalkan.

Tabel 19

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
					Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	587,484,434	14,300,207,976	809,416,107	792.769.753	97,94%
4 01 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	245,277,384	184.719.311	244,441,807	241.772.265	98,91%
4 01 01 1 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245,277,384	184.719.311	244,441,807	241.772.265	98,91%
4 01 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	331,957,050	4,093,896,224	552,474,300	538.648.738	97,50%

4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17,514,000	16.210.000	65,300,000	64.610.000	98,94%
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	29,073,050	0	45,398,300	44.547.242	98,13%
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285,370,000	254.773.996	441,776,000	429.491.496	97,22%
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,250,000	9.879.000	12,500,000	12.348.750	98,79%
4	01	01	1	08	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10,250,000	9.879.000	12,500,000	12.348.750	98,79%
4	01	08				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	3,731,165,566		3,015,835,560		
4	01	08	1	01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2,252,638,361		3,015,835,560	2.951.830.540	97,88%
4	01	08	1	1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1,497,319,111	1.241.364.084	2,059,436,310	2.021.674.688	98,17%

4	01	08	1	1	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	153,780,000	144.211.431	218,034,000	217.550.371	99,78%
4	01	08	1	1	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	601,539,250	470.158.467	738,365,250	712.605.121	96,51%
4	01	08	1	2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan	1,478,527,205	804.182.465	1,372,637,955	1.238.818.618	90,25%
4	01	08	1	2	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Analisisi capaian Kinerja	1,001,591,950	449.128.853	683.169.950	642.032.683	93,98%
4	01	08	1	2	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Non Fisik	319,792,000	278.400.652	476,197,900	419.653.241	88,13%
4	01	08	1	2	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Kebijakan perumusan teknis pembangunan	157,143,255	76.652960	213,270,105	177.132.694	83,06%

2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2022) yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro pelayanan Pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mempunyai tugas menyelenggarakan program pemerintah dalam bidang perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi serta Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Namun untuk realisasi anggarannya mencapai sekitar 95.87%, yang mengindikasikan bahwa capainya dari kegiatan yang dilakukan telah mencapai kesesuaian terhadap kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU yang dituangkan dalam Renstra.

Tabel 20
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023 (TW-II)	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	10		11	12	13
1	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah			25 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	9 Dokumen	-	-	
2	Persentase Realiasi Fisik			95%	95%	98%	95,49%	43%	-	-	

dan Non Fisik pada Perangkat Daerah										
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, perlu disusun dan ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menyusun program kerja serta tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu merupakan unsur staf yang memiliki fungsi perumusan kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh unsur operasional (Dinas Teknis) dan unsur penunjang (Lembaga Teknis Daerah).

Sebagai penyelenggaraan Pengendalian di lingkup Pemerintah Daerah dan masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, antara lain:

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan Pembangunan dan kebijakan Pembangunan.
2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
3. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi serta memberikan teguran kepada pegawai yang bermasalah
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana kerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu telah meriviu rancangan awal RKPD, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang dapat membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Rencana kerja 2024 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu telah mengusulkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dengan usulan sebesar Rp. 5.335.300.390,- (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Riga Ratus Sembiliah Puluh Rupiah) yang nantinya dapat direalisasikan kepada setiap program dan kegiatan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara

V No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	1.679.660.077	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	1.679.660.077	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	126.840.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	126.840.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	126.840.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	126.840.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	110.473.050	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	110.473.050	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	52.368.050	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	52.368.050	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	58.105.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	58.105.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	867.729.315	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	867.729.315	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Unit	149.712.569	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Unit	149.712.569	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	75.878.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	75.878.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Jenis	199.014.746	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Jenis	199.014.746	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245 Laporan	523.124.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245 Laporan	523.124.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	518.672.712	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	518.672.712	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	518.672.712	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	518.672.712	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	55.945.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	55.945.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	55.945.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	55.945.000	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Jumlah Kebbijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		3.575.640.313	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Jumlah Kebbijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		3.575.640.313	
7	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	2.299.848.359	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	2.299.848.359	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	41 Laporan	654.004.934	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	41 Laporan	654.004.934	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	15 Laporan	772.663.725	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	15 Laporan	772.663.725	

8	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	33 Laporan	873.179.700	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	33 Laporan	873.179.700	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	1.275.791.954	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	1.275.791.954	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Analisis capaian Kinerja	12 Laporan	552.713.690	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Analisis capaian Kinerja	12 Laporan	552.713.690	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Non Fisik	12 Laporan	462.836.592	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Non Fisik	12 Laporan	462.836.592	
	Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan perumusan teknis pembangunan	12 Laporan	260.241.672	Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan perumusan teknis pembangunan	12 Laporan	260.241.672	

5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu pada Tahun 2024 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

Tabel 22

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tidak Ada			

B. Biro Organisasi

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi hasil pelaksanaan atas program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan realisasi capaian target kinerjanya sesuai Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu

Biro Organisasi Setdaprovsu menjalankan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja perangkat daerah provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah kab/kota.

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setdaprovsu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setdaprovsu selama tahun 2022 dan perkiraan target pada tahun 2024.

Biro Organisasi Setdaprovsu terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun

2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2023 atas 2 (dua) program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.800.000.000,- yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas 7 Kegiatan dan 11 Sub kegiatan;
2. Program Penataan Organisasi terdiri atas 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Hasil evaluasi rencana kerja Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2023 terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Biro Organisasi sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.925.355.634,- (40,11%) dari 2 (dua) program dan untuk realisasi keuangan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Nasional maka untuk kegiatan perjalanan dinas dengan beberapa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi tidak membebani anggaran terlalu besar sehingga target kinerja dapat terealisasi namun keuangan hanya dapat terealisasi berdasarkan peraturan tersebut.

Pencapaian Kinerja Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2023 berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yaitu :

Tabel. 23
Pencapaian Kinerja Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2021 berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yaitu:

No	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023
			Target	Realisasi	asio Realisasi		
1	Persentase Penataan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Pelayanan Publik	B 3,99	A- 4,20	-	-	A- 4,20	-

3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	11,25	11,30	-	-	11,30	-
---	----------------------------------	-------	-------	---	---	-------	---

2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setdaprovsu

a. Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah adalah efisiensi struktur dengan slogan “Tepat Struktur dan tepat Fungsi” pada Pasal 16 huruf c Pasal 21 ayat (3) huruf b dan ayat (4) menyebutkan bahwa pengendalian Perangkat daerah dapat dilakukan dengan cara evaluasi Struktur Organisasi; besaran organisasi; susunan Perangkat Daerah; perwadahan perumpunan; tugas dan fungsi serta tata cara Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penegandalian penataaan perangkat daerah dalam hal produktifitas dan efisien struktur organisasi guna mempercepat pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dalam rangka Reformasi Birokrasi di bidang kelembagaan dan dengan tujuan meningkatkan kemampuan daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju Perangkat Daerah yang modern berdasarkan UU No 23 Tahun 20143 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Permendagri No 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Untuk itu Pemprovsu telah menindaklanjutinya dengan hal-hal sebagi berikut:

1. Melaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provsu dengan melaksanakan restrukturisasi Perangkat Daerah dari 49 Perangkat Daerah menjadi 40 Perangkat Daerah, Ranperda telah diusulkan untuk Fasilitasi Kemendagri dan sampai saat ini masih proses Fasilitasi Kemendagri.

Tabel. 24

Daftar Restrukturisasi Biro Organisasi Setdaprovsu

NO.	OPD EKSISTING	NO.	HASIL RESTRUKTURISASI
1	2	3	4
1	Sekretariat DPRD	1	Sekretariat DPRD
2	Inspektorat	2	Inspektorat
3	Dinas Pendidikan	3	Dinas Pendidikan
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan
6	Dinas Kesehatan	6	Dinas Kesehatan
7	Rs. Umum Haji Medan	6.A	Upt. Khusus rs. Umum haji medan
8	Rs. Jiwa prof. Dr. M. Ildrem	6.B	Upt. Khusus rs. Jiwa prof. Dr. M. Ildrem
9	Dinas Sosial	7	Dinas Sosial
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
14	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang	10	Dinas Pekerjaan Umum
15	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang
17	Dinas Perhubungan	12	Dinas Perhubungan

18	Dinas Lingkungan Hidup	13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19	Dinas Kehutanan		
20	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	14	Dinas Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		
22	Dinas Perkebunan	15	Dinas Perkebunan dan Peternakan
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	16	Dinas Kelautan dan Perikanan
24	Satuan Polisi Pamong Praja	17	Satuan Polisi Pamong Praja
25	Dinas penanaman modal dan Pelayanan perizinan terpadu satu pintu	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Dinas Tenaga Kerja	19	Dinas Ketenagakerjaan
27	Dinas Koperasi dan UKM	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
29	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	22	Dinas Komunikasi dan Informatika
30	Dinas Komunikasi dan Informatika		
31	Dinas Perpustakaan Danarsip	23	Dinas Perpustakaan dan Arsip
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
34	Badan Penelitian dan Pengembangan		
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26	Badan Keuangan dan Aset Daerah
36	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	27	Badan Pendapatan Daerah
37	Badan Kepegawaian Daerah	28	Badan Kepegawaian
38	Badan Pengembangansumber Daya Manusia	29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
40	Badan Penghubung	31	Badan Penghubung
41	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	32	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
42	Biro Kesejahteraan Rakyat	33	Biro Kesejahteraan Rakyat

43	Biro Hukum	34	Biro Hukum
44	Biro Perekonomian	35	Biro Perekonomian
45	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	36	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
46	Biro administrasi Pembangunan	37	Biro Administrasi Pembangunan
47	Biro Organisasi	38	Biro Organisasi
48	Biro Umum	39	Biro Umum
49	Biro Administrasi Pimpinan	40	Biro Administrasi Pimpinan

Sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Gubsu Nomor 061/10868 tanggal 21 Oktober 2019 hal Evaluasi UPT, serta PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah melaksanakan evaluasi penataan kelambagaan UPTD dan Cabdis pada Dinas, Badan Provsu dengan melakukan monitoring/survey kelengkapan Tahun 2019 s/d 2020;
- b. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 21 ayat (1) menyatakan pada urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional maka RSUD Haji Medan Provsu dan RSJ. Prof. M. Ildrem menjadi UPTD Dinas Kesehatan Provsu;

Sehubungan dengan huruf a dan huruf b, telah ditindaklanjuti dengan penyusunan draf Pergub SOTK UPTD dan Cabdis pada Dinas dan Badan Provsu dan telah diusulkan ke Kemendagri untuk difasilitasi, dan sampai saat ini menunggu rekomendasi Kemendagri RI Jakarta.

1. Untuk Evaluasi Penataan Kelembagaan, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provsu, telah dilaksanakan dengan melakukan Evaluasi Perda dan Perbup/Perwal hasilnya adalah rekomendasi Provinsi untuk ke Kabupaten/Kota.

2. Sesuai Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemprovsu telah menindaklanjuti melalui usulan sebanyak 500 Jabatan Administrasi dan Pengawas, mendapatkan rekomendasi persetujuan melalui Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/5863/OTDA tanggal 10 September 2021 hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maka sebanyak 452 Pejabat Administrasi dan Pengawas, 48 Jabatan tidak direkomendasikan untuk dilantik. Pemprovsu telah melaksanakan Pelantikan Jabatan Administrasi kedalam jabatan Fungsional sebanyak 381 Pejabat Administrasi dan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2021 di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu dan terdapat 71 (tujuh puluh satu) Jabatan Administrasi yang tidak dilakukan pelantikan kedalam Jabatan Fungsional disebabkan terdapat jabatan yang lowong dan perubahan nama pejabat dari hasil persetujuan akibat adanya promosi jabatan, memasuki pensiun dan meninggal dunia.
3. Sehubungan dengan point ke 3 (tiga) maka Pemprovsu telah menindaklanjutinya dengan penyusunan draf Pergub SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Draf Pergub Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara; Draf Pergub Badan Daerah dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara; dan Draf Pergub Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara dan pada saat ini sedang proses pengundangan.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan, serta melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/115/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap Pelaporan Kinerja Memperoleh nilai 7,40 dari bobot 10 untuk capaian tahun 2021.
5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan, serta melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/115/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap kualitas Pelayanan Publik memperoleh nilai 3,80 dari skala 0-5 untuk capaian tahun 2021.

6. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan, serta melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/115/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap kualitas Pelayanan Publik memperoleh nilai 3,80 dari skala 0-5 untuk capaian tahun 2021.

3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Biro Organisasi Setdaprovsu merupakan unit kerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Organisasi memiliki Indikator Kinerja Utama dalam mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2022. Adapun sasaran dan capaian terhadap indikator kinerja utama Biro Organisasi Setdaprovsu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25

Adapun sasaran dan capaian terhadap indikator kinerja utama Biro Organisasi Setdaprovsu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1. Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Indeks Pelayanan Publik	2,99	3,51	3,51	4,01	4,20
			3. Nilai Capaian Pelaporan Kinerja.	10	11	12	14	11,30

Dari hasil penetapan tujuan dan sasaran terhadap indikator kinerja utama Biro Organisasi Setdaprovsu melalui Rencana Strategis Biro Organisasi Setdaprovsu 2019-2023 hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Hasil capaian Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1. Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	-
			2. Indeks Pelayanan Publik	3,00	3,68	3,80	3,99	-
			3. Nilai Capaian Pelaporan Kinerja.	8,99	9,11	11,75	11,25	-

4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD telah ditentukan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu pada Tahun 2023 sebesar Rp. 4.800.000.000,- Jumlah anggaran dalam Renja Biro Organisasi Setdaprovsu yang diakomodir dalam P-APBD Biro Organisasi Setdaprovsu sebesar Rp. Rp 3.734.668.774,-. Dengan adanya ketersediaan dana untuk tahun Anggaran 2023 berkurang dari rancangan awal.

Rancangan awal RKPD untuk tahun anggaran 2023 dengan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu adalah sebesar Rp 4.800.000.000,- Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 disajikan dengan Tabel 2.4. (T-C 31) pada lampiran Renja.

a. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023)

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2024 – 2026, Pada rancangan akhir RKPD telah ditentukan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu pada Tahun 2023 sebesar Rp. 4.800.000.000,- Jumlah anggaran dalam Renja Biro Organisasi Setdaprovsu yang diakomodir dalam DPA sebesar Rp. 3.734.668.774,- terdiri dari 2 Program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 7 kegiatan dan 11 sub kegiatan.

2) Program Penataan Organisasi , 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Target maupun capaian kinerja dan realisasi anggaran Program/Kegiatan Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 26
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun Anggaran 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Sisa Anggaran
1	2	3	4	6	7	8
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
I	SEKRETARIATAN DAERAH		4.800.000.000	1.925.355.634	40,11%	2.874.644.366
I	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.783.898.500	628.187.964	35,21%	1.155.710.536
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.700.000	-	0%	20.700.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan	20.700.000	-	0%	20.700.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		436.771.200	217.005.600	49,68%	219.765.600
	Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola administrasi perkantoran dan keuangan	324.211.200	174.105.600	53,70%	150.105.600
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Terbayarnya Honor Kegiatan Administrasi Perkantoran/Keuangan	112.560.000	42.900.000	38,11%	69.660.000

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		132.464.000	5.000.000	3,77%	127.464.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Apartur yang mengikuti Diklat dan dinyatakan lulus	132.464.000	5.000.000	3,77%	127.464.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.051.094.232	400.182.364	38,07%	650.911.868
01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	72.901.632	25.505.914	34,99%	47.395.718
02	Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan,	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	127.902.600	14.674.400	11,47%	113.228.200
03	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah pegawai dan tamu dari unit kerja lain yang difasilitasi	33.084.000	21.300.000	64,38%	11.784.000
04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang menghadiri rapat kordinasi dan konsultasi.	817.206.000	338.702.050	41,45%	478.503.950
5	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		119.804.068	-	0%	119.804.068
01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	119.804.068	-	0%	119.804.068
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.065.000	1.000.000	32,63%	2.065.000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.065.000	1.000.000	32,63%	2.065.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.000.000	5.000.000	25,00%	15.000.000
01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki dan	20.000.000	5.000.000	25,00%	15.000.000

		dipelihara				
II	PROGAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Penataan Organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi	2.224.776.000	1.297.167.670	43,01%	927.608.330
1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang terfasilitasi	827.969.000	496.397.098	47,43%	331.571.902
01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah draf Perda dan Pergub hasil penataan dan evaluasi yang terselesaikan.	312.566.000	146.378.552	54,73%	166.187.448
02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan.	261.354.000	114.655.146	43,87%	146.698.854
03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Jabatan yang telah disusun Anjab ABK.	517.654.000	235.363.400	45,47%	288.290.600
2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang terfasilitasi	1.969.614.500	800.770.572	40,66%	1.168.843.928
01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan RB.	453.312.500	207.620.560	45,80%	245.691.940
02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang di evaluasi dan monitoring.	303.427.500	132.704.900	43,74%	1701.722.600
03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/kota	323.716.000	58.922.350	18,20%	264.793.650

		yang dievaluasi.				
04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintah	Jumlah kebijakan di bidang ketatalaksanaan yang dikelola.	322.887.500	211.867.862	65,62%	111.019.638
05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik.	566.271.000	189.654.900	33,49%	376.616.100

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Organisasi Setdaprovsu Setdaprovsu pada Tahun 2024 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Ofganisasi Setdaprovsu.

Tabel 27115

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Biro Orgnisasi Setdaprovsu

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tidak Ada			

C. Biro Umum

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum Setdaprovsu Tahun Lalu

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Umum Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Umum Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Umum Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Umum Setdaprovsu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum Setdaprovsu selama tahun 2022 dan perkiraan target pada tahun 2024.

Biro Umum Setdaprovsu terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Umum pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Biro Umum Setdaprovsu. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	95,09 %
Anggaran	:	Rp. 93.796.948.683
Realisasi	:	Rp. 89.188.980.859
Sisa	:	Rp. 4.607.967.824
 - B. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	85,69%
Anggaran	:	Rp. 1.568.713.216
Realisasi	:	Rp. 1.344.246.029
Sisa	:	Rp. 224.467.187
 - C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	89,58%
Anggaran	:	Rp. 122.981.612.697
Realisasi	:	Rp. 110.164.581.664
Sisa	:	Rp. 12.817.031.033
 - D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	:	87,30%
Anggaran	:	Rp. 17.174.600.000
Realisasi	:	Rp. 14.992.989.250
Sisa	:	Rp. 2.181.610.750

- E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyelesaian Pekerjaan : 84,76 %
 Anggaran . : Rp. 46.668.548.015
 Realisasi : Rp. 39.557.648.204
 Sisa : Rp. 7.110.899.811
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyelesaian Pekerjaan : 81,11 %
 Anggaran . : Rp. 102.163.134.508
 Realisasi : Rp. 82.867.928.464
 Sisa : Rp. 19.295.506.044
- G. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
- Penyelesaian Pekerjaan : 95,71%
 Anggaran . : Rp. 11.140.831.920
 Realisasi : Rp. 10.663.019.443
 Sisa : Rp. 477.812.477
- H. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Penyelesaian Pekerjaan : 81,72 %
 Anggaran . : Rp. 12.820.161.125
 Realisasi : Rp. 10.477.007.975
 Sisa : Rp. 2.343.153.150
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- A. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Penyelesaian Pekerjaan : 99,73 %
 Anggaran . : Rp. 302.526.574.911
 Realisasi : Rp. 301.709.939.536
 Sisa : Rp. 816.635.375

Tabel 28
 Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan Yang Tercantum Pada RKPD Biro Umum
 Tahun Anggaran 2022

Program /Kegiatan	P.APBD	Realisasi	%	Sisa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.255.961.404	73.013.262.245	94,51	4.242.699.159
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	16.540.987.279	16.175.718.614	97,79	365.268.665

SKPD				
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>				
Pengamanan Barang Milik Daerah	1.568.713.216	1.344.246.029	85,69	224.467.187
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.102.222.092	28.397.763.136	78,66	7.704.458.956
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.194.348.085	26.462.552.725	93,86	1.731.795.360
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.166.095.520	1.043.614.850	89,50	122.480.670
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.768.825.000	1.760.370.623	99,52	8.454.377
Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.963.662.000	47.877.671.811	97,78	1.085.990.189
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.786.460.000	4.622.608.519	68,12	2.163.851.481
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.683.600.000	12.590.989.250	85,75	2.092.610.750
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.491.000.000	2.402.000.000	96,43	89.000.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	152.100.000	146.730.000	96,47	5.370.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.830.456.000	6.768.027.008	62,49	4.062.428.992
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	638.880.000	580.800.000	90,91	58.080.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.047.112.015	32.062.091.196	91,48	2.985.020.819
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	2.090.711.036	1.420.475.369	67,94	670.235.667

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.823.592.064	20.360.819.488	93,30	1.462.772.576
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Bangunan Lainnya	16.904.753.750	15.280.950.490	90,39	1.623.803.260
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	61.344.077.658	45.805.683.117	74,67	15.538.394.541
<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	11.140.831.920	10.663.091.443	95,71	477.740.477
<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>				
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12.820.161.125	10.477.007.975	81,72	2.343.153.150
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	609.081.055	531.401.549	87,25	77.679.506
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa				
<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	302.526.574.91 1	301.709.939.53 6	99,73	816.635.375
Jumlah	711.450.206.13 0	659.134.945.15 4	92,65	52.315.260.976

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Umum SetdaprovSU dengan SKPD lain.
4. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
5. Masih kurangnya Aparatur dalam melaksanakan penanganan perkara Di Lingkungan PemprovSU.
6. Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
7. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik Kabupaten/kota.

3. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program SKPD, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program SKPD itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan Biro Umum SetdaprovSU, antara lain :

1. Bahwa draft ranperda yang masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) ProvSU belum semuanya dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini tentunya berdampak kepada Pembangunan di Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Masih minimnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Evaluasi terhadap ranperda Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya berdampak kepada Tugas dan Fungsi Gubernur sebagai Pembina dan Pengawas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan berdampak terhadap pelaporan ke Pemerintah Pusat.
3. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Biro Umum SetdaprovSU berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
4. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

5. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Biro Umum Setdaprovsu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan;
3. Kerjasama dengan pihak SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				62.438.891.301	65.865.283.393	36.267.185.800			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.318.713.216	1.568.713.216	414.758.344	0,31	414.758.344	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				61.120.178.085	64.296.570.177	35.852.427.456			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.150.958.300	36.102.222.092	20.321.819.320	0,58	20.321.819.320	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.969.219.785	28.194.348.085	15.530.608.136	0,60	15.530.608.136	
			Penyediaan Bahan Bakar Logistik			-	1.141.136.270	1.166.095.520	951.731.700	0,83	951.731.700	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.748.825.000	1.768.825.000	1.565.199.623	0,90	1.565.199.623	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu				48.740.887.000	48.963.662.000	21.830.134.124	0,45	21.830.134.124	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.596.000.000	6.786.460.000	1.174.891.617	0,18	1.174.891.617	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.296.000.000	17.174.600.000	7.177.189.250	0,39	7.177.189.250	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				14.315.000.000	14.683.600.000	7.177.189.250	0,50	7.177.189.250	

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.981.000.000	2.491.000.000	-	0,00	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.936.296.000	10.982.556.000	25.167.272.208	2,53	25.167.272.208	
			Penyedia Jasa Usaha Surat Menyurat				305.920.000	152.100.000	97.820.000	0,32	97.820.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			-	9.630.376.000	10.830.456.000	4.020.202.685	0,42	4.020.202.685	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				638.880.000	638.880.000	290.400.000	0,45	290.400.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				35.159.174.448	35.047.112.015	20.758.849.523	0,59	20.758.849.523	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				16.204.905.915	23.914.303.127	31.939.017.191	1,97	31.939.017.191	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.368.351.016	2.090.711.063	585.674.074	0,25	585.674.074	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.836.554.899	21.823.592.064	9.270.162.757	0,67	9.270.162.757	

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.906.605.257	16.904.753.750	10.917.476.478	0,65	10.917.476.478	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				53.123.669.750	61.344.077.658	11.165.703.882	0,21	11.165.703.882	
			Admiistrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				22.574.634.945	24.570.074.100	8.888.527.401			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10.691.148.920	11.140.831.920	8.888.527.401			
			Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah				11.883.486.025	13.429.242.180	6.723.009.921		6.723.009.921	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				11.274.404.970	12.820.161.125	6.619.621.363	0,59	6.619.621.363	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				609.081.055	609.081.055	103.388.558	0,17	103.388.558	
			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				201.392.054.911	302.526.574.911	217.702.150	0,00	217.702.150	

			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				201.392.054.911	302.526.574.911	217.702.150	0,00	217.702.150	
JUMLAH					-	0		711.450.206.130	217.702.150,00		217.702.150	

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada unit–unit kerja lingkup pemerintah daerah dan masyarakat yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip–prinsip Pemerintah yang baik (*Good Governance*) dalam proses pemberian pelayanan publik dalam rangka mendukung pendistribusian surat dan pelaksanaan pelayanan kedinasan KDH/WKDH serta penggunaan mess/wisma tamu/pesanggrahan yang dikelola oleh Biro Umum Setdaprovsu .

Gambaran keberhasilan disini hanya merupakan upaya mengkuantifikasi ukuran – ukuran keberhasilan yang tidak terlepas dari kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Hal ini disebabkan organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Secara umum pelaksanaan dan fungsi Biro Umum Setdaropvsu telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Kebijaksanaan pada dasarnya adalah ketentuan yang ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran agar diimplementasikan melalui program dan kegiatan secara operasional. Melalui analisis lingkungan internal dan eksternal dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka dipandang perlu untuk menetapkan strategi pencapaian target.

Untuk kepentingan keterarahan pelaksanaan upaya merealisasikan visi dan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan yang berpijak kepada nilai norma yang ada untuk itu perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Menargetkan batas waktu penyelesaian program kerja dan peningkatan pelaksanaan tugas.
- b. Perlu peningkatan, pemahaman para pejabat pengelola penataan ketatalaksanaan dan peningkatan tatakerja birokrat mengenai pradigma baru dibidang pemerintah dan pembangunan menuju *Good Governance*.
- c. Perlu adanya transparansi program kegiatan Biro Umum kepada masyarakat melalui media informasi.

Tabel 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum SetdaprovSU

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023 (TW-II)	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	10		11	12	13
1	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan			100%	100%	100%	100%	100 %	-	-	
2	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess PemprovSU			100%	100%	100%	91,70 %	48 %	-	-	

3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, memuat program dan kegiatan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing SKPD masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing SKPD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Gubernur).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, maka penyusunan Renja Biro Umum SetdaprovSU Tahun 2022 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang diperuntukkan bagi Biro Umum SetdaprovSU setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana Biro Umum SetdaprovSU.

Demikian halnya juga program dan kegiatan Biro Umum SetdaprovSU, program dan kegiatan prioritas tahun 2022, yang masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan,

terdapat beberapa perubahan dan penambahan pada program dan kegiatan. Perubahan tersebut antara lain adalah perubahan target capaian kinerja dan perubahan nomenkatur/tata nama kegiatan dan bertambahnya kegiatan.

Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, Biro Umum Setdaprovsu mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk dimasukkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Usulan program dan kegiatan dari Biro Umum Setdaprovsu tersebut, merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan visi dan misi Biro Umum Setdaprovsu.

Tabel 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum SetdaprovSU

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			256.145.179.161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				256.145.179.161	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	73.452.680.989	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	73.452.680.989
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			72.518.369.379	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				72.518.369.379	
4	01	01	01.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			934.311.610	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				934.311.610	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	1.878.132.871	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	1.878.132.871

4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				334.752.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				334.752.000
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.534.380.871	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.534.380.871
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				117.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				117.000.000
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				117.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				117.000.000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	64.202.252.018	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	64.202.252.018
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.160.821.368	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.160.821.368
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.811.337.168	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.811.337.168
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				721.574.725	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				721.574.725
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.049.698.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.049.698.100
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.058.741.657	Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.058.741.657

4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.400.079.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.400.079.000
4	01	01	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	12.739.135.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	12.739.135.000
4	01	01	01.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				6.033.200.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				6.033.200.000
4	01	01	01.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.705.935.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.705.935.000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	31.600.670.756	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	31.600.670.756
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				129.462.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				129.462.500
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasai Sumber Daya Air dan Listrik	Dalam dan Luar Daerah	100%	11.116.474.293	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasai Sumber Daya Air dan Listrik	Dalam dan Luar Daerah	100%	11.116.474.293

4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.752.964.320	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.752.964.320
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.601.769.643	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.601.769.643
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	47.937.749.269	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	47.937.749.269
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.156.839.009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.156.839.009
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.850.463.318	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.850.463.318
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.247.280.685	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.247.280.685
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.683.166.257	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.683.166.257

4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	11.191.148.920	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	11.191.148.920
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10.691.148.920	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10.691.148.920
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				375.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				375.000.000
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				125.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				125.000.000
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	13.026.409.338	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	13.026.409.338

4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				6.661.807.338	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				6.661.807.338
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				3.490.227.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				3.490.227.000
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				2.874.375.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				2.874.375.000
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				169.013.855.800	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				169.013.855.800
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dalam dan Luar Daerah	100%	169.013.855.800	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dalam dan Luar Daerah	100%	169.013.855.800
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				169.013.855.800	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				169.013.855.800
					Total Pagu				425.159.034.961	Total Pagu				425.159.034.961

4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Umum Setdaprovsu pada Tahun 2024 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Umum Setdaprovsu.

Tabel 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setdaprovsu

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tidak Ada			

D. Biro Administrasi Pimpinan

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu selama tahun 2023 dan perkiraan target pada tahun 2024.

Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 100% terealisasi 100%, jika dikaitkan dengan anggaran terealisasi sebesar 66.09%. Kegiatan ini berupa pelatihan bagi Pegawai untuk meningkatkan kualitas Pegawai.
2. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 100% terealisasi 100%, jika dikaitkan dengan anggaran terealisasi sebesar 72.28%. Kegiatan ini berupa service peralatan kantor.

- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tingginya aktivitas Pegawai dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan.
2. Adanya pemindahan sekaligus perawatan videotron.

- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dari kegiatan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU, antara lain:

1. Padatnya kegiatan pimpinan menyebabkan Pegawai tidak dapat mengikuti pelatihan Pegawai.
2. Kondisi peralatan dan mesin kantor yang masih bagus.

- d. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan update data dan informasi pelatihan pegawai untuk meningkatkan kualitas Pegawai.
2. Dibutuhkan penambahan Pegawai agar pelaksanaan fasilitasi kegiatan Pimpinan berjalan dengan baik.
3. Membuat daftar pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya secara rutin.

Tabel 33

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	17,500,000,000	14,300,207,976	18,192,116,488	17,833,004,534	98.03%	17,561,513,911	49,694,726,421	99.00%
4 01 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000	224,118,300	49,000,000	46,400,000	94.69%	255,000,000	525,518,300	99.14%
4 01 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000	130,589,200	21,000,000	19,400,000	92.38%	30,000,000	179,989,200	96.86%

4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000	93,529,100	28,000,000	27,000,000	96.43%	225,000,000	345,529,100	99.60%
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,861,091,600	555,300,000	2,038,322,817	2,027,506,395	99.47%	2,805,625,761	5,388,432,156	99.78%
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,861,091,600	555,300,000	2,038,322,817	2,027,506,395	99.47%	2,805,625,761	5,388,432,156	99.78%
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,381,783,440	727,866,187	2,106,252,555	2,018,870,404	95.85%	2,580,959,000	5,327,695,591	98.14%
4	01	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2,224,272,440	515,622,287	1,997,752,555	1,947,160,404	97.47%	2,403,209,000	4,865,991,691	98.85%
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	157,511,000	212,243,900	108,500,000	71,710,000	66.09%	177,750,000	461,703,900	87.15%
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat	3,695,503,919	4,093,896,224	4,161,860,616	4,121,446,780	99.03%	3,222,004,250	11,437,347,254	99.45%

							Daerah								
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	934,877,842	2,468,986,267	679,150,000	672,195,864	98.98%	531,920,836	7,122,353,883	99.43%
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	717,122,144	591,229,780	640,787,190	640,531,190	99.96%	719,455,882	1,951,216,852	99.98%
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	236,020,000	155,097,000	163,212,800	163,212,800	100.00%	280,520,000	598,829,800	100.00%
4	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	401,156,032	353,304,000	305,286,032	290,142,628	95.04%	313,476,032	956,922,660	97.55%
4	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	674,000,000	14,700,000	1,248,614,815	1,233,537,287	98.79%	821,560,000	2,069,797,287	99.27%
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	732,327,901	510,579,177	1,124,809,779	1,121,827,011	99.73%	555,071,500	2,187,477,688	99.82%
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,000,000	16,997,000	13,000,000	13,000,000	100.00%	13,000,000	42,997,000	100.00%

4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa materai	13,000,000	16,997,000	13,000,000	13,000,000	100.00%	13,000,000	42,997,000	100.00%
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274,400,000	296,556,600	167,950,000	121,397,000	72.28%	307,100,000	725,053,600	90.20%
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	274,400,000	296,556,600	167,950,000	121,397,000	72.28%	307,100,000	725,053,600	90.20%
4	01	01	1	13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2,638,240,000	2,053,703,741	1,873,105,000	1,827,311,315	97.56%	2,070,680,100	5,951,695,156	98.84%
4	01	01	1	13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	373,700,000	948,570,741	345,919,000	312,099,349	90.22%	294,690,600	1,555,360,690	94.72%
4	01	01	1	13	02	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,818,740,000	466,309,200	1,327,186,000	1,318,211,966	99.32%	1,575,989,500	3,360,510,666	99.69%
4	01	01	1	13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	445,800,000	638,823,800	200,000,000	197,000,000	98.50%	200,000,000	1,035,823,800	99.25%
4	01	01	1	14		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	5,555,981,041	5,646,927,799	7,782,625,500	7,657,072,640	98.39%	6,307,144,800	19,611,145,239	99.11%
4	01	01	1	14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1,345,544,800	1,120,440,500	1,750,727,500	1,674,271,000	95.63%	1,345,544,800	4,140,256,300	97.53%

							Pelaksanaan Acara									
4	01	01	1	14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,500,000,000	1,585,826,732	2,068,254,000	2,066,352,706	99.91%	2,180,000,000	5,832,179,438	99.96%	
4	01	01	1	14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2,710,436,241	2,940,660,567	3,963,644,000	3,916,448,934	98.81%	2,781,600,000	9,638,709,501	99.30%	

2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2022) yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro pelayanan pimpinan. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan, keprotokolkan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu pemerintah daerah dan Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah.

Dalam urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu. Kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu berupa penyediaan dan penyiapan materi rapat dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, memfasilitasi penyelenggaraan komunikasi pimpinan mulai dari mencari, mengolah hingga menyajikan bahan untuk komunikasi pimpinan, dan pengelolaan dokumentasi pimpinan berupa dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur, cendera mata dari tamu pemerintah daerah dan dokumentasi penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan untuk urusan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah, kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu adalah pelayanan keprotokolkan dalam penyelenggaraan acara dan kegiatan pimpinan berupa fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara dalam bentuk pelayanan keprotokolkan yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemberian dukungan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan. Fasilitasi kunjungan tamu mencakup penjemputan, akomodasi penginapan serta penjadwalan kegiatan bersama pimpinan.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Namun untuk realisasi anggarannya mencapai sekitar 98.29%, yang mengindikasikan bahwa capainya dari kegiatan yang dilakukan telah mencapai kesesuaian terhadap kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovs yang dituangkan dalam Renstra.

Tabel. 34
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023 (TW-II)	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	10		11	12	13
1	Persentase fasilitasi materi pimpinan			100%	100%	100%	100%	50%	-	-	
2	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	50%	-	-	

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu, perlu disusun dan ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menyusun program kerja serta tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu merupakan unsur staf yang memiliki fungsi perumusan kebijakan pimpinan yang akan dilaksanakan oleh unsur operasional (Dinas Teknis) dan unsur penunjang (Lembaga Teknis Daerah).

Sebagai penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah dan masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu, antara lain:

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.
2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
3. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi serta memberikan teguran kepada pegawai yang bermasalah
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana kerja Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU telah meriviu rancangan awal RKPD, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang dapat membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Rencana kerja 2024 Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU telah mengusulkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU dengan usulan sebesar Rp. 17.500.000.000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang nantinya dapat direalisasikan kepada setiap program dan kegiatan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 35

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU

Nama Perangkat Daerah : Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	17,500,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	17,500,000,000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dok	30,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dok	30,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200 Laporan	50,000,000	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,861,091,600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,861,091,600	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	2,861,091,600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	2,861,091,600	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2,381,783,440	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2,381,783,440	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	2,224,272,440	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	2,224,272,440	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	157,511,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	157,511,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3,695,503,919	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3,695,503,919	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Unit	934,877,842	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Unit	934,877,842	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Jenis	717,122,144	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Jenis	717,122,144	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Jenis	236,020,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Jenis	236,020,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Bahan Bacaan	401,156,032	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Bahan Bacaan	401,156,032	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	365 Laporan	674,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	365 Laporan	674,000,000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245 Laporan	732,327,901	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245 Laporan	732,327,901	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	13,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	13,000,000	
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa materai	1300 Buah	13,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa materai	1300 Buah	13,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	274,400,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	274,400,000	
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	274,400,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	274,400,000	

	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	2,638,240,000	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	2,638,240,000	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan Disiapkan	730 Dok	373,700,000	Penyiapan Materi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan Disiapkan	730 Dok	373,700,000	
	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	730 Laporan	1,818,740,000	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	730 Laporan	1,818,740,000	
8	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	730 Laporan	445,800,000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	730 Laporan	445,800,000	
	Fasilitasi Keprotokolan	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	100%	5,555,981,041	Fasilitasi Keprotokolan	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	100%	5,555,981,041	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Pelaksanaan Acara	365 Laporan	1,345,544,800	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Pelaksanaan Acara	365 Laporan	1,345,544,800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	365 Laporan	1,500,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	365 Laporan	1,500,000,000	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Keprotokolan	365 Laporan	2,710,436,241	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Keprotokolan	365 Laporan	2,710,436,241	

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu pada Tahun 2024 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu.

Tabel. 36
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara
Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tidak Ada

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Pemerintahan dan Otonomi SetdaprovSU merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya untuk memberikan kejelasan arah dan langkah dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU, sehingga akan mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat dan pihak swasta sekaligus sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi dan sasaran yang akan dicapai yang menjadi fokus penetapan

program, kegiatan dan sumber daya organisasi yang menggambarkan pencapaian dan realisasi tujuan yang terukur serta adanya kepastian waktu penyelesaiannya.

Melalui tujuan tersebut Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. TUJUAN

Tujuan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2. SASARAN

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Penyelesaian Batas Daerah di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

3. Program Dan Kegiatan Prioritas

A. Program.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp.8.282.400.000,- (Delapan milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

B. Kegiatan Prioritas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu

- a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 1.550.000.000,-
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp.2.650.000.000,-
- c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp.1.340.000.000,-

Tabel. 37

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDAPROVSU
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDAPROVSU

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	100%	1,842,400,000	APBD		100%	2,034,140,000
4	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sumatera Utara		8,200,000	APBD			9,020,000
4	01	01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	20 Dokumen	8,200,000	APBD		20 Dokumen	9,020,000
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Sumatera Utara		7,200,000	APBD			7,920,000

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	01	01	1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumatera Utara	10 Laporan	7,200,000	APBD		10 Laporan	7,920,000
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	Sumatera Utara	100%	25,000,000	APBD		100%	35,000,000
4	01	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Utara	40 orang	25,000,000	APBD		40 orang	35,000,000
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	Sumatera Utara	100%	915,000,000	APBD		100%	956,500,000

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	01	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	4 Paket	35,000,000	APBD		4 Paket	38,500,000
4	01	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	3 Paket	320,000,000	APBD		3 Paket	352,000,000
4	01	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Paket	60,000,000	APBD		1 Paket	66,000,000
4	01	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	1 Laporan	500,000,000	APBD		1 Laporan	500,000,000
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	Sumatera Utara	100%	767,000,000	APBD		100%	893,700,000
4	01	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	1 Laporan	7,000,000	APBD		1 Laporan	7,700,000

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	01	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Laporan	760,000,000	APBD		1 Laporan	886,000,000
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	120,000,000	APBD		100%	132,000,000
4	01	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	20 Unit	120,000,000	APBD		20 Unit	132,000,000
4	01	03				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sumatera Utara	100%	6,440,000,000	APBD		100%	7,084,000,000

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	01	03	1	01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Sumatera Utara	100%	1,850,000,000	APBD		100%	2,035,000,000
4	01	03	1	01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	1 Dokumen	850,000,000	APBD		1 Dokumen	935,000,000
4	01	03	1	01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	1 Dokumen	1,000,000,000	APBD		1 Dokumen	1,100,000,000
4	01	03	1	02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	100%	2,950,000,000	APBD		100%	3,245,000,000
4	01	03	1	02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Sumatera Utara	1 Dokumen	1,500,000,000	APBD		1 Dokumen	1,650,000,000

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	01	03	1	02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Sumatera Utara	1 Dokumen	550,000,000	APBD		1 Dokumen	605,000,000
4	01	03	1	02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sumatera Utara	1 Laporan	900,000,000	APBD		1 Laporan	990,000,000
4	01	03	1	03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	Sumatera Utara	100%	1,640,000,000	APBD		100%	1,804,000,000
4	01	03	1	03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Sumatera Utara	1 Dokumen	600,000,000	APBD		1 Dokumen	660,000,000
4	01	03	1	03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Sumatera Utara	1 Dokumen	480,000,000	APBD		1 Dokumen	528,000,000

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	01	03	1	03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Sumatera Utara	1 Laporan	560,000,000	APBD		1 Laporan	616,000,000

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
4. Meningkatkan jaringan hubungan kerja dengan pihak terkait lainnya.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan OPD terkait untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- b. Merumuskan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan tenaga kerja.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 1. Terkoordinasinya Perencanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA dan DPA Sekretariat Daerah;
 2. Tersusunnya Pelaporan LPPD, LKPJ, LK, PK, IKU dan IKK Sekretariat Daerah;
 3. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sumatera Utara.
- Merumuskan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan tenaga kerja.
- tersusunnya kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan tenaga kerja.
- terselenggaranya kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan tenaga kerja.

3. Program dan Kegiatan

1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 1.881.499.887.- dan program Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 575.926.408.814.- 575.926.408.814,-.

C. Biro Hukum

1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja-Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan pembangunan. Dimana satuan kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapat legalisasi dan jaminan bahwa usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini adalah Bappeda yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib, Biro Hukum Setdaprovsu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pemerintahan Umum antara lain Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda), Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kualitas Aparatur Penegak Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyusunan usulan program dan kegiatan pada Rencana APBD Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2024.

1. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan fasilitasi peraturan daerah, dan eksaminasi keputusan kepala daerah serta pelayanan bantuan hukum dan penanganan permasalahan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Utara, guna mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Utara.

2. Sasaran

Penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 mempunyai sasaran kepada terwujudnya pelayanan prima dalam hal pelaksanaan kegiatan evaluasi dan fasilitasi peraturan daerah, dan eksaminasi keputusan kepala daerah serta pelayanan bantuan hukum dan penanganan permasalahan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Utara, guna mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Utara.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu ini meliputi:

1. Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemrovsu dan Masyarakat.

3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu yang direncanakan untuk periode Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat dalam lampiran.

D. Biro Perekonomian

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rancangan awal Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah visi besar Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan juga di dalam RPJMD 2024-2026 yaitu :

“Sumatera Yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional
4. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan

pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setdapovsu adalah Misi Pertama yakni :

“Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau”

2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian Setdaprovsu

Tujuan dan Sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel. 38
Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian Setdaprovsu

Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat			
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Penguatan sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi, dan integrasi pemangku kepetingan lingkup Perekonomian untuk mewujudkan kebijakan Perekonomian daerah	Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
			Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan daerah yang mendukung Pengendalian Inflasi Daerah
		Pembinaan, Fasilitasi administrasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMD dan BLUD untuk mencapai peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah dengan prinsip tata kelolaperusahaan yang baik	Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan BUMD dan BLUD untuk mencapai kemandirian, berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat serta agen pembangunan daerah

3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2023 adalah:

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
- b. Pencapaian SPM.
- c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2024 adalah 2 (dua) Program dan 8 Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39

Program dan kegiatan Biro Perekonomian

KODE PROGRAM/ KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN
(1)					(2)	(3)
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi
4	01	01	1.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Keuangan</i>
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4	01	01	1.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian</i>
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
4	01	01	1.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian</i>
4	01	01	1.06	02	<u>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	01	01	1.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4	01	01	1.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik</i>
4	01	01	1.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
4	01	06			Program Perekonomian dan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang

					Pembangunan	diimplementasikan
4	01	06	1.01		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4	01	06	1.02		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
4	01	06	1.03		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup

dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.
6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi pimpinan Lembaga Pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan dan pelayanan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
- b. Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Terkoordinirnya dan terfasilitasinya OPD Pemprov dan Instansi terkait serta mitra binaan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;.
- b. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sumber dana APBD maupun APBN;
- c. Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3. Program dan Kegiatan

1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp.604.781.941,-
- b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar 4.924.613.861,-

2. Kegiatan

Kegiatan Prioritas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara:

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.542.678.080,-
- b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Rp.64.890.000,-
- c. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp.72.600.000,-
- d. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran Rp.1.684.042.891,- terdiri dari sub kegiatan:
 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.693.106.891,-

2. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.320.900.000,-
3. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa anggaran sebesar Rp.670.036.000,-
- e. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik anggaran sebesar Rp.1.952.946.885,- terdiri dari sub kegiatan:
 1. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik anggaran sebesar Rp.349.808.685,-
 2. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.1,212.737.500,-
 3. Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.390.400.700,-
- f. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.1.287.624.085,- terdiri dari sub kegiatan:
 1. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.897.944.235,-
 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.256.871.880,-
 3. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.132.807.970,-

Kegiatan indikatif penjabaran program kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, dana Indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci direferensikan pada tabel T-C.33 (terlampir).

F. Biro Administrasi Pembangunan

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD

(rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.
6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi Pembangunan Lembaga Pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.

2. Tujuan Dan Sasaran

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Memberikan pelayanan kegiatan Pembangunan.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka

sasaran Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah.
- b. Meciptakan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Program Dan Kegiatan

1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kebijakan Pembangunan Daerah , yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 5.335.300.900-.

2. Kegiatan Prioritas Biro Administrasi Pembangunan

- a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 654.004.934.-
- b. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 772.663.725.-
- c. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang diusulkan sebesar Rp. 462.836.592.-

Kegiatan indikatif penjabaran program kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, dana Indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci direferensikan pada tabel T-C.33 Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

Tabel. 40

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	1.679.660.077	APBD		100%	1.679.660.077
4 01 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	126.840.000	APBD		100%	126.840.000
4 01 01 1 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	126.840.000	APBD		1 Dok	126.840.000
4 01 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	110.473.050	APBD		100%	110.473.050
4 01 01 1 05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	52.368.050	APBD		100%	52.368.050
4 01 01 1 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	5 Orang	58.105.000	APBD		5 Orang	58.105.000

								Pelatihan						
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	867.729.315	APBD		100%	867.729.315
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Unit	149.712.569	APBD		25 Unit	149.712.569
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	75.878.000	APBD		1 Tahun	75.878.000
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Jenis	199.014.746	APBD		100 Jenis	199.014.746
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245 Laporan	523.124.000	APBD		245 Laporan	523.124.000
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	518.672.712	APBD		100%	518.672.712
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	518.672.712	APBD		12 Bulan	518.672.712
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	55.945.000	APBD		100%	55.945.000

4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	55.945.000	APBD		15 Unit	55.945.000
4	01	08	1			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Jumlah Kebbijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		3.575.640.313	APBD			3.575.640.313
4	01	08	1	1		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	2.299.848.359	APBD		100%	2.299.848.359
4	01	08	1	1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	41 Laporan	654.004.934	APBD		41 Laporan	654.004.934
4	01	08	1	1	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	15 Laporan	772.663.725	APBD		15 Laporan	772.663.725
4	01	08	1	1	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	33 Laporan	873.179.700	APBD		33 Laporan	873.179.700
4	01	08	1	2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	1.275.791.954	APBD		100%	1.275.791.954
4	01	08	1	2	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Analisis capaian Kinerja	12 Laporan	552.713.690	APBD		12 Laporan	552.713.690

4	01	08	1	2	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Non Fisik	12 Laporan	462.836.592	APBD		12 Laporan	462.836.592
4	01	08	1	2	03	Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan perumusan teknis pembangunan	12 Laporan	260.241.672	APBD		12 Laporan	260.241.672

G. Biro Organisasi

1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan pembangunan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapat legalisasi dan jaminan bahwa usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD.

2. Tujuan dan sasaran Biro Organisasi Setdaprovsu.

1. Tujuan

Adapun tujuan Biro Organisasi Setdaprovsu adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih.

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan "Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" Biro Organisasi menetapkan 3 sasaran yaitu:

- a. Tatalakelola pemerintahan yang tepat ukuran dan tepat fungsi
- b. Terselenggaranya pelayanan publik prima oleh pengguna layanan.
- c. Pelaporan kinerja terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatnya perolehan capaian nilai reformasi birokrasi yang baik dan afektif.

3. Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu.

A. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Organisasi Setdaprovsu akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu, 2 (dua) Program 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 5.798.898.500-. yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 Kegiatan dan 11 Sub kegiatan;
2. Program Penataan Organisasi dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan.

H. Biro Umum

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan

berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Umum SetdaprovSU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.
6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi pimpinan Lembaga Pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu komponen Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berada pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Biro Umum di bentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengukuhan juga dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Sumut.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk menetapkan tujuan yang sesuai dengan kepentingan mewujudkan Visi dan Misi, serta mengacu kepada faktor – faktor kunci keberhasilan maka Misi yang telah ditetapkan dianalisis keterkaitannya dengan faktor – faktor kunci keberhasilan.

Tujuan Biro Umum Setdaprovsu adalah :

- 1) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Ketatausahaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan layanan konsultasi/tamu di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Meningkatnya Fasilitas Penataan dan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

b. Sasaran

Mengacu kepada Tujuan yang ditetapkan maka ditetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan itu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Yang Berorientasi Pada Pelayanan Prima. dengan indikatornya sebagai berikut :
 - a. Persentase Layanan Administrasi Umum
2. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah
 - a. Persentase Fasilitas Kedinasan Pimpinan Daerah.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprovsu
 - a. Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu

3. Program dan Kegiatan

a. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Umum Setdaprovsu akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari 9 (delapan) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 256.159.064.961-. dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 169.013.855.800-.

b. Kegiatan Prioritas Biro Umum

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp 64.202.252.018.-
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 13.026.409.338.-
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 169.013.856.800.-

Kegiatan indikatif penjabaran program kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, dana Indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci direferensikan pada tabel T-C.33 Rencana Kerja (Renja) Biro Umum Setdaprovsu.

Tabel 41
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Umum SetdaprovSU Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE PROGRAM/ KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				256.145.179.161				514.201.058.042
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	73.452.680.989	APBD		100%	103.525.989.203
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				72.518.369.379				84.981.557.544
4	01	01	01.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				934.311.610				18.544.431.659
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada	Dalam dan Luar Daerah	100%	1.878.132.871	APBD		100%	3.185.580.084

						Perangkat Daerah								
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				334.752.000					1.758.715.762
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.543.380.871					1.426.864.322
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				117.000.000					224.224.000
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				117.000.000					224.224.000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	64.202.252.018					178.915.855.137
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.160.821.368					40.474.923.233
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.811.337.168					31.609.247.526
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				721.574.752					1.307.333.009
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.049.698.100					1.983.065.084
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

									49.058.741.657				95.932.850.250
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.400.079.000				7.608.436.035
4	01	01	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	12.739.135.000				19.254.787.552
4	01	01	01.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				6.033.200.000				16.462.077.632
4	01	01	01.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.705.935.000				2.792.709.920
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	31.600.670.756	APBD		100%	52.321.042.552
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				129.462.500				170.522.352
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasai Sumber Daya Air dan Listrik	Dalam dan Luar Daerah	100%	11.116.474.293	APBD		100%	12.142.240.831

4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.752.964.320				716.261.146
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.601.769.643				39.292.018.223
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	47.937.749.269	APBD		100%	116.651.957.655
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.156.839.009				2.343.937.957
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.850.463.318				24.466.865.536
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.247.280.685				18.952.257.524
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.683.166.257				70.888.896.638

4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	11.191.148.920	APBD		100%	13.274.115.112
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10.691.148.920				12.254.915.112
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				375.000.000				764.400.000
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				125.000.000				254.800.000
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	13.026.409.338	APBD		100%	26.847.506.747
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				6.661.807.338				14.372.939.041
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				3.490.227.000				6.840.939.706
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat				2.874.375.000				5.633.628.000

					Daerah								
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				169.013.855.800				223.705.586.427
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dalam dan Luar Daerah	100%	169.013.855.800	APBD		100%	223.705.586.427
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				169.013.855.800				223.705.586.427
					Total Pagu				425.159.034.961				737.906.644.469

A. Biro Administrasi Pimpinan

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.
6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi pimpinan Lembaga Pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

a. Tujuan

Tujuan dari Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengoordinasian perencanaan, pelaporan dan kepegawaian sekretariat daerah.
- b. Memberikan pelayanan kegiatan pimpinan.

b. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, kepegawaian sekretariat daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan.

3. Program dan Kegiatan

a. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 17.500.000.000.-.

b. Kegiatan Prioritas Biro Administrasi Pimpinan

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 674.000.000.-
2. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 2.638.240.000.-
3. Fasilitasi Keprotokolan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 5.555.981.041.-

Kegiatan indikatif penjabaran program kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, dana Indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan

kegiatan tersebut secara terperinci direferensikan pada tabel T-C.33 Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu.

Tabel. 42

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Sumatera Utara	100%	17,500,000,000	APBD		100%	19,250,000,000
4	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	80,000,000	APBD		100%	88,000,000
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100 Dok	30,000,000	APBD		100 Dok	33,000,000
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Utara	200 Laporan	50,000,000	APBD		200 Laporan	55,000,000

4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	2,861,091,600	APBD		100%	3,147,200,760
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	1 Dok	2,861,091,600	APBD		1 Dok	3,147,200,760
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	2,381,783,440	APBD		100%	2,619,961,784
4	01	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	100%	2,224,272,440	APBD		100%	2,446,699,684
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Utara	15 Orang	157,511,000	APBD		15 Orang	173,262,100
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	3,695,503,919	APBD		100%	4,065,054,311
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	43 Unit	934,877,842	APBD		43 Unit	1,028,365,626
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	150 Jenis	717,122,144	APBD		150 Jenis	788,834,358
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Utara	13 Jenis	236,020,000	APBD		13 Jenis	259,622,000
4	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sumatera Utara	36 Bahan Bacaan	401,156,032	APBD		36 Bahan Bacaan	441,271,635

4	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Utara	365 Laporan	674,000,000	APBD		365 Laporan	741,400,000
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	245 Laporan	732,327,901	APBD		245 Laporan	805,560,691
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	100%	13,000,000	APBD		100%	14,300,000
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa materai	Sumatera Utara	1300 Buah	13,000,000	APBD		1300 Buah	14,300,000
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	100%	274,400,000	APBD		100%	301,840,000
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	6 Unit	274,400,000	APBD		6 Unit	301,840,000
4	01	01	1	13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Sumatera Utara	100%	2,638,240,000	APBD		100%	2,902,064,000
4	01	01	1	13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Sumatera Utara	730 Dok	373,700,000	APBD		730 Dok	411,070,000
4	01	01	1	13	02	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sumatera Utara	730 Laporan	1,818,740,000	APBD		730 Laporan	2,000,614,000
4	01	01	1	13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sumatera Utara	730 Laporan	445,800,000	APBD		730 Laporan	490,380,000
4	01	01	1	14		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	Sumatera Utara	100%	5,555,981,041	APBD		100%	6,111,579,145

4	01	01	1	14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sumatera Utara	365 Laporan	1,345,544,800	APBD		365 Laporan	1,480,099,280
4	01	01	1	14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sumatera Utara	365 Laporan	1,500,000,000	APBD		365 Laporan	1,650,000,000
4	01	01	1	14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sumatera Utara	365 Laporan	2,710,436,241	APBD		365 Laporan	2,981,479,865

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu Tahun 2024 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Rancangan awal Renja Tahun 2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 43

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BIRO PEREKONOMIAN SETDAPROVSU

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE PROGRAM/ KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	90%	1,589,694,400
4	01	01	1.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Keuangan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>451,051,200</i>
4	01	01	1.02	...	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	451,051,200
4	01	01	1.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian</i>	<i>22 orang</i>	<i>71,954,700</i>
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	62,304,700
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	9,650,000
4	01	01	1.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian</i>	<i>12 bulan</i>	<i>1,046,688,500</i>
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	123,449,150

4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500 Paket	280,125,262
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	110,394,000
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	9,150,088
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	523,570,000
4	01	01	1.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik</i>	<i>10 unit</i>	<i>20.000.000</i>
4	01	01	1.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	20.000.000
4	01	06			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	2,910,305,600
4	01	06	1.01		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	90%	1,064,017,000
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	515,734,000
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	548,283,000
4	01	06	1.02		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>849,567,000</i>

4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 dokumen	324,122,000
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8 dokumen	201,747,000
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 dokumen	323,698,000
4	01	06	1.03		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>996,721,600</i>
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	12 dokumen	298,914,000
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	12 dokumen	299,052,000
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12 dokumen	300.000.000
TOTAL								4.500.000.000

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Tahun 2024 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2026. Rancangan awal Renja Tahun 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel. 44
Program dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.881.499.887.-
	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 575.926.408.814.-

C. **Biro Hukum**

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu yang direncanakan untuk periode Tahun 2024 (yang secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel terlampir) meliputi:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, Rp. 3.161.600.000, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Rp. 175.000.000**
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Rp. 175.000.000
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Rp. 1.405.000.000**
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, Rp. 1.175.000.000
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Rp. 230.000.000
- 3. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah, Rp. 1.238.000.000**
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Rp. 215.000.000
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Rp. 19.000.000
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Rp. 4.000.000
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Rp. 1.000.000.000
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Rp. 328.600.000**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Rp. 3.600.000
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Rp. 160.000.000
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Rp. 165.000.000
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Rp. 15.000.000**
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Rp. 15.000.000

II. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM, Rp. 4.615.000.000, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, Rp. 1.835.000.000

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Rp. 700.000.000
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, Rp. 35.000.000
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, Rp. 500.000.000
- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota, Rp. 600.000.000

2. Fasilitasi Bantuan Hukum, Rp. 2.780.000.000

- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, Rp. 750.000.000
- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, Rp. 2.030.000.000

Total keseluruhan sebesar Rp. 7.776.600.000

D. Biro Perekonomian

Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2024 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Rancangan awal Renja Tahun 2024 Biro Perekonomian Setdaprovsu mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 45

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BIRO PEREKONOMIAN SETDAPROVSU TAHUN ANGGARAN 2023

KODE PROGRAM/ KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	1.775.000.000
4	01	01	1.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Keuangan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>500.000.000</i>
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	500.000.000
4	01	01	1.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian</i>	<i>20 Orang</i>	<i>150.000.000</i>
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	150.000.000
4	01	01	1.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>1.025.000.000</i>
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	200.000.000
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500 Paket	200.000.000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100.000.000
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	6 dokumen	25.000.000

					Perundang-undangan	Disediakan		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	500.000.000
4	01	01	1.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>50.000.000</i>
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.000.000
4	01	01	1.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik</i>	<i>16 unit</i>	<i>50.000.000</i>
4	01	01	1.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	50.000.000
4	01	06			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	3.050.000.000
4	01	06	1.01		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	<i>100%</i>	<i>1.200.000.000</i>
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	650.000.000
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	550.000.000
4	01	06	1.02		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>850,000,000</i>

4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 dokumen	325,000,000
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8 dokumen	200,000,000
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 dokumen	325,000,000
4	01	06	1.03		<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>1.000.000.000</i>
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	15 dokumen	400.000.000
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	12 dokumen	300.000.000
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12 dokumen	300.000.000
TOTAL								5.000.000.000

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu Tahun 2024 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 – 2026. Rancangan Awal Renja Tahun 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu mengusulkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tertera pada tabel berikut:

Tabel 46

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	604.781.941
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.678.080
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.050.080
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.288.000
c	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.700.000
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.640.000
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.600.000
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.890.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.890.000
II.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	4.924.613.861
1	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.684.042.891
a	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	693.106.891
b	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	320.900.000
c	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	670.036.000
2	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	1.952.946.885
a	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	349.808.685

b	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.212.737.500
c	Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	390.400.700
3	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1.287.624.085
a	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	897.944.235
b	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	256.871.880
c	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	132.807.970

F. Biro Administrasi Pembangunan

Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2024 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Rancangan awal Renja Tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 47

Program, kegiatan dan subkegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.679.660.077
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.840.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126.840.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.473.050
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	52.368.050
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.105.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	867.729.315
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.712.569
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.878.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.014.746
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.124.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	518.672.712
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518.672.712

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.945.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.945.000
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.575.640.313
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2.299.848.359
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	654.004.934
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	772.663.725
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	873.179.700
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.275.791.954
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	552.713.690
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	462.836.592
	Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	260.241.672

G. Biro Organisasi

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2024 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Rancangan Awal Renja Tahun 2024 Biro Organisasi Setdaprovsu mengusulkan Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel. 48
Program/Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu

No	Program/Kegiatan	
1	2	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		
1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota
	03	Penataan Analisis Jabatan
2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 37 pada lampiran

H. Biro Umum

1. Program Biro Umum Setdaprovsu

Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi pejabaran visi misi yang telah ditetapkan serta mampu mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- a. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governnace), yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisien ketatalaksanaan dan prosedur kerja pada tingkatan struktur organisasi kerja.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima mudah, dan murah.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya adalah :

- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. | 73.452.680.989,- |
| b. Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah | Rp. | 1.878.132.871,- |
| c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp. | 117.000.000,- |
| d. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. | 64.202.252.018,- |
| e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah | Rp. | 12.739.135.000,- |
| f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah | Rp. | 31.600.670.756,- |
| g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. | 47.937.749.269,- |
| h. Administrasi Keuangan dan Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Rp. | 11.191.148.920,- |
| i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Rp. | 13.026.409.338,- |

3. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya adalah :

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 169.013.855.800,-

Dari uraian diatas, diketahui bahwa APBD yang meliputi pelaksanaan belanja tidak langsung adalah sebesar ***Rp.425.159.034.961,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)*** Sedangkan belanja langsung berupa gaji dan TPP Sekretariat Daerah Provsu, Biro Umum Setdaprovsu hanya mengusulkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk ditampung dalam APBD dan selanjutnya dimasukkan dalam Renja, RKA, dan DPA

I. Biro Administrasi Pimpinan

Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu Tahun 2024 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Rancangan awal Renja Tahun 2024 Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel. 49
Program/Kegiatan dan Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17,500,000,000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,861,091,600
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,861,091,600
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,381,783,440
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2,224,272,440
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	157,511,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,695,503,919
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	934,877,842
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	717,122,144
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	236,020,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	401,156,032
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	674,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	732,327,901
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,000,000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	274,400,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274,400,000
7	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2,638,240,000
	Penyiapan Materi Pimpinan	373,700,000
	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	1,818,740,000
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	445,800,000
8	Fasilitasi Keprotokolan	5,555,981,041
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1,345,544,800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,500,000,000
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2,710,436,241

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan acuan untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, sehingga efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara terus dioptimalkan agar berjalan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang disusun setiap tahun anggaran untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur Pimpinan dan staf yang disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu Renja bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif tersebut, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan good governance dan clean government.

Akhirnya rumusan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.


SEKRETARIS DAERAH
ARJEE S. TRINUGROHO

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Utara	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,842,400,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Utara	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,742,400,000	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Kinerja Perangkat Daerah	100%	8,200,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	8,200,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	-	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	7,200,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	-	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	7,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	-	
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	25,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	20,000,000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	25,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	20,000,000	
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	915,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	757,342,680	

1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,000,000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	320,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	179,285,680	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	67,635,000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	465,422,000	
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%	767,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%	845,332,520	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,800,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	760,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	838,532,520	
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	120,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	119,724,800	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	120,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	119,724,800	

B.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Sumatera Utara	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	6,440,000,000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Sumatera Utara	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	5,540,000,000	
I.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sumatera Utara	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	1,850,000,000	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sumatera Utara	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	1,550,000,000	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	850,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	700,000,000	
2	Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1,000,000,000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	850,000,000	
II.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	2,950,000,000	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	2,650,000,000	
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	1,500,000,000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	1,350,000,000	
2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	550,000,000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	500,000,000	
3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	900,000,000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	800,000,000	
III.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sumatera Utara	Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	100%	1,640,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sumatera Utara	Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	100%	1,340,000,000	

1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	600,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	500,000,000	
2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	480,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	380,000,000	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	560,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	460,000,000	

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	100%	1,842,400,000	APBD		100%	2,034,140,000
4 01 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	8,200,000	APBD		100%	9,020,000
4 01 01 1 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	20 Dokumen	8,200,000	APBD		20 Dokumen	9,020,000
4 01 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	7,200,000	APBD		100%	7,920,000
4 01 01 1 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumatera Utara	10 Laporan	7,200,000	APBD		10 Laporan	7,920,000
4 01 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	Sumatera Utara	100%	25,000,000	APBD		100%	35,000,000

4	01	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Utara	40 orang	25,000,000	APBD		40 orang	35,000,000
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	Sumatera Utara	100%	915,000,000	APBD		100%	956,500,000
4	01	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	4 Paket	35,000,000	APBD		4 Paket	38,500,000
4	01	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	3 Paket	320,000,000	APBD		3 Paket	352,000,000
4	01	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Paket	60,000,000	APBD		1 Paket	66,000,000
4	01	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	1 Laporan	500,000,000	APBD		1 Laporan	500,000,000
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	Sumatera Utara	100%	767,000,000	APBD		100%	893,700,000
4	01	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	1 Laporan	7,000,000	APBD		1 Laporan	7,700,000
4	01	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Laporan	760,000,000	APBD		1 Laporan	886,000,000

4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	120,000,000	APBD		100%	132,000,000
4	01	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	20 Unit	120,000,000	APBD		20 Unit	132,000,000
4	01	03				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sumatera Utara	100%	6,440,000,000	APBD		100%	7,084,000,000
4	01	03	1	01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Sumatera Utara	100%	1,850,000,000	APBD		100%	2,035,000,000
4	01	03	1	01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	1 Dokumen	850,000,000	APBD		1 Dokumen	935,000,000
4	01	03	1	01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	1 Dokumen	1,000,000,000	APBD		1 Dokumen	1,100,000,000
4	01	03	1	02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	100%	2,950,000,000	APBD		100%	3,245,000,000
4	01	03	1	02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Sumatera Utara	1 Dokumen	1,500,000,000	APBD		1 Dokumen	1,650,000,000

4	01	03	1	02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Sumatera Utara	1 Dokumen	550,000,000	APBD		1 Dokumen	605,000,000
4	01	03	1	02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sumatera Utara	1 Laporan	900,000,000	APBD		1 Laporan	990,000,000
4	01	03	1	03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	Sumatera Utara	100%	1,640,000,000	APBD		100%	1,804,000,000
4	01	03	1	03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Sumatera Utara	1 Dokumen	600,000,000	APBD		1 Dokumen	660,000,000
4	01	03	1	03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Sumatera Utara	1 Dokumen	480,000,000	APBD		1 Dokumen	528,000,000
4	01	03	1	03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Sumatera Utara	1 Laporan	560,000,000	APBD		1 Laporan	616,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,842,400,000
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,200,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,200,000
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,200,000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,200,000
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,000,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	915,000,000
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320,000,000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,000,000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,000,000
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767,000,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	760,000,000
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,000,000
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120,000,000
B.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	6,440,000,000
I.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1,850,000,000
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	850,000,000
2	Fasilitasi Penataan Wilayah	1,000,000,000
II.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	2,950,000,000
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1,500,000,000
2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	550,000,000
3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	900,000,000
III.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1,640,000,000
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	600,000,000
2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	480,000,000
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	560,000,000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcomes)/ Kegiatan (output)	INDIKATOR TAHUN 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		TARGET KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA TAHUN 2024	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
				Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	80%	100%	72%	72.20%	100.00%	252.200%	252.20%				
4	01	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah	100%	3 Dokumen	100%	100%	100.00%	100.00%	300.00%	300.00%				
4	01	01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	3 Dokumen	20 Dokumen	3	3	3	100.00%	3	9	45.00%
4	01	01	1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	1 Dokumen	100%			#DIV/0!	1	1	100.00%			
4	01	01	1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	1 Dokumen	10 Laporan			#DIV/0!	1	1	10.00%	
4	01	01	1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%		100%			#DIV/0!		0	0.00%			
4	01	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	orang	40 orang			#DIV/0!		0	0.00%		
4	01	01	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	60.90%	60.90%	100%	260.900%	260.90%		
4	01	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	100%	4 Paket		#DIV/0!	100%	200%	50.00%		
4	01	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhi Alat Tulis Kantor, Terselenggaranya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Biro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	100%	3 Paket	100%	100%	100.00%	100%	300%	100.00%	
4	01	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Cetak dan Penggandaan surat-surat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	100%	1 Paket	100%	100%	100.00%	100%	300%	300.00%	
4	01	01	1	06	0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%	100.00%	100%	100.00%		

4	01	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	300%	300.00%			
4	01	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Masuk dan Keluar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	100%	1	Laporan	100%	100%	100%	100.00%	100%	300%	300.00%
4	01	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Biro				100%			100%	100%	100%	100.00%	100%	300%	#DIV/0!
4	01	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	100%	1	Laporan	100%	100%	100%	100.00%	100%	300%	300.00%
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Perengkapan Kantor	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	300%	300.00%		
4	01	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Perengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	100%	20	Unit	100%	100%	100%	100.00%	100%	300%	15.00%
4	01	03				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	100%	100%	93.30%	100%	99.80%	99.80%	100%	293.10%	293.100%		
4	01	03	1	01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya Dokumen Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	100%	100%	79.80%	100%	99.30%	99.30%	100%	279.10%	279.100%		
4	01	03	1	01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		1	Dokumen	33 Kab/Kota	1	Dokumen	13	33	33	100.00%	33	79	7900%
4	01	03	1	01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kecamatan, Penilaian Kecamatan Terbaik kab/kota, Fasilitasi Pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1	Dokumen	132 orang	1	Dokumen	132	132	132	100.00%	132	396	39600.00%

4	01	03	1	01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	terlaksananya penataan wilayah perbatasan, Penataan Pemutahiran dan Verifikasi Pembakuan nama-nama Rupa Bumi dan Toponimi, Pemutahiran dan Verifikasi penyusunan data wilayah dan kode wilayah administrasi pemerintahan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	100.00%		2	200.00%
4	01	03	1	02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	300.00%	300.00%
4	01	03	1	02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terfasilitasinya Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1	Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	300.00%	300.00%
4	01	03	1	02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan SPM diProvinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
4	01	03	1	02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Ringkasan LPPD yang disusun, Jumlah LKPJ Gubsu yang tersusun	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Laporan	1 Dokumen, 1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
4	01	03	1	03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	300.00%	300.00%
4	01	03	1	03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase Kerjasama dengan Pemerintah yang ditindaklanjuti, Persentase Kunjungan Tamu Asing yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1	Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	300.00%	300.00%
4	01	03	1	03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Persentase Kerjasama dengan Badan Usaha/Swasta yang ditindaklanjuti	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1	Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	300.00%	300.00%
4	01	03	1	03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan Monitoring yang tersusun terkait Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1	Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%

TABEL 2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama SKPD : BIRO HUKUM SETDAPROVSU

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				7,776,600,000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				7,776,600,000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3,161,600,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3,161,600,000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Hukum	Jumlah pelaksanaan penatausahaan SKPD	15 dokumen	175,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Hukum	Jumlah pelaksanaan penatausahaan SKPD	15 dokumen	175,000,000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Hukum	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55 orang	1,175,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Hukum	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55 orang	1,175,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	220 orang	230,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	220 orang	230,000,000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Hukum	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor	48 paket	215,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Hukum	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor	48 paket	215,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Hukum	Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/ Fotocopy	210000 paket	19,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Hukum	Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/ Fotocopy	210000 paket	19,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	1510 dokumen	4,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	1510 dokumen	4,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Hukum	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	100 laporan	1,000,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Hukum	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	100 laporan	1,000,000,000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Hukum	Jumlah Pengiriman surat/paket	550 laporan	3,600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Hukum	Jumlah Pengiriman surat/paket	550 laporan	3,600,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Hukum	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26 unit	160,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Hukum	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26 unit	160,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Hukum	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum	6 orang	165,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Hukum	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum	6 orang	165,000,000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Hukum	Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki	110 unit	15,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Hukum	Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki	110 unit	15,000,000	
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				4,615,000,000	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				4,615,000,000	
1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum	Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam & di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun.	80 dokumen	700,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum	Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam & di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun.	80 dokumen	700,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	750 dokumen	35,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	750 dokumen	35,000,000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum	Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi & Informasi Kab/Kota yang terintegrasi	20 dokumen	500,000,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum	Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi & Informasi Kab/Kota yang terintegrasi	20 dokumen	500,000,000	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Biro Hukum	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	600 dokumen	600,000,000	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Biro Hukum	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	600 dokumen	600,000,000	
2	Fasilitasi Bantuan Hukum					Fasilitasi Bantuan Hukum					
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan & Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi	35 kasus	750,000,000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan & Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi	35 kasus	750,000,000	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Biro Hukum	Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM & Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi	40 kasus	2,030,000,000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Biro Hukum	Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM & Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi	40 kasus	2,030,000,000	
	JUMLAH				7,776,600,000	JUMLAH				7,776,600,000	

Medan, Februari 2023

Kepala Biro Hukum Setdaprovus,



Dwi Aries Sudarto, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710413 199603 1 002

TABEL 3.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM SETDAPROVSU
TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				7,776,600,000				7,776,600,000
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN								
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3,161,600,000				3,161,600,000
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	175,000,000			100%	175,000,000
4 01 01 1.02 02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan SKPD	Biro Hukum Setdaprovsu	15 dokumen	175,000,000	PAD		15 dokumen	175,000,000
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1,405,000,000				1,405,000,000
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan	Biro Hukum Setdaprovsu	55 orang	1,175,000,000	PAD		55 orang	1,175,000,000
4 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	Biro Hukum Setdaprovsu	220 orang	230,000,000	PAD		220 orang	230,000,000
4 01 01 1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1,238,000,000			100%	1,238,000,000
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor	Biro Hukum Setdaprovsu	48 paket	215,000,000	PAD		48 paket	215,000,000
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/Fotocopy	Biro Hukum Setdaprovsu	210000 paket	19,000,000	PAD		210000 paket	19,000,000
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Biro Hukum Setdaprovsu	1510 dokumen	4,000,000	PAD		1510 dokumen	4,000,000
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Biro Hukum Setdaprovsu	100 laporan	1,000,000,000	PAD		100 laporan	1,000,000,000
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	328,600,000			100%	328,600,000
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman surat/paket	Biro Hukum Setdaprovsu	550 laporan	3,600,000	PAD		550 laporan	3,600,000
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Biro Hukum Setdaprovsu	26 unit	160,000,000	PAD		26 unit	160,000,000
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum	Biro Hukum Setdaprovsu	6 orang	165,000,000	PAD		6 orang	165,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15,000,000				15,000,000
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki	Biro Hukum Setdaprovsu	110 unit	15,000,000	PAD		110 unit	15,000,000
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				4,615,000,000				4,615,000,000
4 01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan			100%	1,835,000,000			100%	1,835,000,000
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam & di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun.	Biro Hukum Setdaprovsu	80 dokumen	700,000,000	PAD		80 dokumen	700,000,000
4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	Biro Hukum Setdaprovsu	750 dokumen	35,000,000	PAD		750 dokumen	35,000,000
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi & Informasi Kab/Kota yang terintegrasi	Biro Hukum Setdaprovsu	20 dokumen	500,000,000	PAD		20 dokumen	500,000,000
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Biro Hukum Setdaprovsu	600 dokumen	600,000,000	PAD		600 dokumen	600,000,000
4 01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			100%	2,780,000,000			100%	2,780,000,000
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan & Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi	Biro Hukum Setdaprovsu	35 kasus	750,000,000	PAD		35 kasus	750,000,000
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM & Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi	Biro Hukum Setdaprovsu	40 kasus	2,030,000,000	PAD		40 kasus	2,030,000,000
					7,776,600,000				7,776,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11

Kepala Biro Hukum Setdaprovsu,



Dwi Aries Sudarto, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710413 199603 1 002

Tabel T-C.29

Ringkasan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022
Biro Pengadaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Sumatera Utara	100%	604,781,941	APBD		100%	604,781,941
01	1 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	12 Bulan	542,678,080	APBD		12 Bulan	542,678,080
01	1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	12 Bulan	150,050,080	APBD		12 Bulan	150,050,080
01	1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	4 Paket	56,288,000	APBD		4 Paket	56,288,000
01	1 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Utara	12 Paket	120,700,000	APBD		12 Paket	120,700,000
01	1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	35 laporan	215,640,000	APBD		35 laporan	215,640,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Idikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	1 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	72,600,000	APBD		100%	72,600,000
01	1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Utara	4 paket	72,600,000	APBD		4 paket	72,600,000
01	1 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	100%	64,890,000	APBD		100%	64,890,000
01	1 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4 laporan	64,890,000	APBD		4 laporan	64,890,000
04		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		100%	4,924,613,861	APBD		100%	4,924,613,861

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Idikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
04	1	7	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi	Sumatera Utara	100%	1,684,042,891	APBD		100%	1,684,042,891
04	1	7	01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan yang dibina	Sumatera Utara	12 bulan	693,106,891	APBD		12 bulan	693,106,891
04	1	7	02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai level 8/9 kematangan	Sumatera Utara	5 Kabupaten / Kota	320,900,000	APBD		5 Kabupaten / Kota	320,900,000
01	1	7	03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengadaan yang mengikuti pengembangan kompetensi (20 JPL)	Sumatera Utara	42 orang	670,036,000	APBD		42 orang	670,036,000
04	1	7	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	<i>Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>100%</i>	<i>1,952,946,885</i>	<i>APBD</i>		<i>100%</i>	<i>1,952,946,885</i>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Idikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
04	1	7	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai 17 Standar LPSE	Sumatera Utara	7 Kabupaten / Kota	349,808,685	APBD		7 Kabupaten / Kota	349,808,685
04	1	7	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem	Sumatera Utara	12 bulan	1,212,737,500	APBD		12 bulan	1,212,737,500
04	1	7	03	Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mencapai 17 Standar LPSE	Sumatera Utara	7 Kabupaten / Kota	390,400,700	APBD		7 Kabupaten / Kota	390,400,700

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

No.	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	604,781,941	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	604,781,941	
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	542,678,080	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	542,678,080	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,050,080	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	150,050,080	
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56,288,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	56,288,000	
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120,700,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	120,700,000	
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215,640,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	215,640,000	
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,600,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	72,600,000	

No.	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4 paket	72,600,000	
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64,890,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	64,890,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,890,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 laporan	64,890,000	
II.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	4,924,613,861	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pelayanan yang diimplementasikan	100%	4,924,613,861	
1	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,684,042,891	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumatera Utara	Persentase Pembinaan dan Advokasi	100%	1,684,042,891	
a	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	693,106,891	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Sumatera Utara	Fasilitas Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan yang dibina	12 bulan	693,106,891	
b.	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	320,900,000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumatera Utara	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai level 8/9 kematangan Proaktif	5 Kabupaten/ Kota	320,900,000	

No.	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
c.	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	670,036,000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Sumatera Utara	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengadaan yang mengikuti pengembangan kompetensi (20 JPL)	42 orang	670,036,000	
2	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	1,952,946,885	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	100%	1,952,946,885	
a.	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	349,808,685	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Sumatera Utara	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai 17 Standar LPSE	7 Kabupaten/Kota	349,808,685	
b.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,212,737,500	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumatera Utara	Fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem	12 bulan	1,212,737,500	
c.	Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	390,400,700	Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumatera Utara	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mencapai 17 Standar LPSE	7 Kabupaten/Kota	390,400,700	
3	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1,287,624,085	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	100%	1,287,624,085	
a.	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	897,944,235	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumatera Utara	Jumlah etalase katalog elektronik lokal	30 etalase	897,944,235	

No.	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
b.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	256,871,880	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sumatera Utara	Jumlah paket tender/seleksi yang diproses Pokja	204 paket	256,871,880	
c.	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	132,807,970	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sumatera Utara	Jumlah laporan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	132,807,970	

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstras Pernagkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan		
					Target perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/	
01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	604,781,941	439,841,080	614,883,638	572,026,317	93.52	604,781,941	1,616,649,338	2.67
01	1 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	542,678,080	381,961,080	482,080,438	444,536,317	92.21	478,638,741	1,305,136,138	2.40
01	1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150,050,080					137,628,741		
01	1 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	56,288,000					41,300,000		
01	1 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	120,700,000					89,270,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstras Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan		
					Target perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/	
01	1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	215,640,000				210,440,000			
01	1 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,600,000	5,400,000	93,403,200	92,160,000	98.67	86,743,200	184,303,200	2.54
01	1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	72,600,000	5,400,000	93,403,200	92,160,000	98.67	86,743,200	184,303,200	2.54
01	1 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64,890,000	52,480,000	39,400,000	35,330,000	89.67	39,400,000	127,210,000	1.96
01	1 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64,890,000	52,480,000	39,400,000	35,330,000	89.67	39,400,000	127,210,000	1.96

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstras Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan				
					Target perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/			
04		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	4,924,613,861	4,590,963,328	4,352,556,362	4,251,162,108	97.81	5,223,618,059					
04	1	7	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi	1,684,042,891	1,301,036,573	1,465,183,606	1,418,850,687	97.01	1,552,063,939	4,271,951,199	2.54	
04	1	7	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan yang dibina	693,106,891	112,735,000	308,327,056	303,486,432	98.43	355,618,339	771,839,771	1.11
04	1	7	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai level 8/9 kematangan	320,900,000	899,201,988	384,038,300	368,437,547	95.94	419,315,600	1,686,955,135	5.26
01	1	7	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengadaan yang mengikuti pengembangan kompetensi (20 JPL)	670,036,000	289,099,585	772,818,250	746,926,708	96.65	777,130,000	1,813,156,293	2.71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstras Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan				
					Target perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/			
04	1	7		<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	<i>Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	1,952,946,885	1,722,351,278	1,363,589,056	1,357,898,996	99	1,823,007,278	4,903,257,552	2.51
04	1	7	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai 17 Standar LPSE	349,808,685	380,547,556	205,597,056	202,479,012	98.48	262,240,000	845,266,568	2.42
04	1	7	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem	1,212,737,500	1,173,657,400	846,000,000	844,854,500	99.86	1,140,210,000	3,158,721,900	2.60
04	1	7	03	Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mencapai 17 Standar LPSE	390,400,700	168,146,322	311,992,000	310,565,484	99.54	372,487,278	851,199,084	2.18
04	1	7		<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1,287,624,085	1,567,575,477	1,523,783,700	1,474,412,425	97.13	1,848,546,842	4,890,534,744	3.80
04	1	7	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah etalase katalog elektronik lokal	897,944,235	477,710,850	714,735,352	677,557,843	94.80	887,074,000	2,042,342,693	2.27

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstras Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan		
					Target perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/	
;04	1 7 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket tender/seleksi yang diproses Pokja	256,871,880	513,072,500	505,698,348	501,037,563	99.08	690,222,842	1,704,332,905	6.63
;04	1 7 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan evaluasi pengadaan barang dan jasa	132,807,970	576,792,127	303,350,000	295,817,019	97.52	271,250,000	1,143,859,146	8.61



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA